



DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN

RENCANA STRATEGIS **RENSTRA** DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEBUMEN



2025
2029



DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu Renstra mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomerklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Serta Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Penyelarasan kebijakan pada penyusunan Renstra dilakukan dengan mensinkronkan beberapa dokumen diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen, Rencana Strategis Kementerian Pertanian, Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

Penyusunan Renstra ini, diharapkan dapat menjadikan landasan dalam mewujudkan sistem perencanaan dan kinerja yang lebih baik, menuju tercapainya hasil pembangunan yang diharapkan dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Kebumen, 19 September 2025
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN



TEGUH YULIONO, S.T. M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP.19780731 200501 1 006

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEBUMEN	9
2.1. Gambaran Pelayanan	
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	9
2.1.2 Sumberdaya Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	16
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	23
2.1.4 Kelompok Sasaran layanan	29
2.1.5 Mitra Dinas Pertanian dan Pangan dalam Memberikan Pelayanan	29
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis	29
2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	29
2.2.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	33
2.2.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	39
2.2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD	42
2.2.5 Penentuan Isu-isu Strategis	43
III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	45
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 – 2029	45

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan	47
IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	49
4.1 Rencana Program	49
4.2 Rencana Kegiatan	50
4.3 Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	51
4.4 Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan	73
V. PENUTUP	78
5.1. Hasil Review Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	78
5.2. Sinkronisasi Renstra Dinas Pertanian dan Pangan	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Kepegawaian Berdasarkan Eselon Tahun 2024	16
Tabel 2.2.	Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024	17
Tabel 2.3.	Kepegawaian Berdasarkan Golongan Tahun 2024	18
Tabel 2.4.	Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024	18
Tabel 2.5.	Petugas Penunjang Kegiatan (P2K) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2024	19
Tabel 2.6.	Data Sumber Daya Sarana dan Prasarana Tahun 2024 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	20
Tabel 2.7.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	24
Tabel 2.8.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	27
Tabel 2.9.	Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	30
Tabel 2.10.	Sinkronisasi Program Unggulan Bupati Kebumen dengan Program Distapang Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029	37
Tabel 2.1.1 .	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah	38
Tabel 2.12.	Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen	42
Tabel 2.13	Isu Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	44
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	46
Tabel 3.2.	Arah Kebijakan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	47
Tabel 3.3.	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	48
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen beserta Rencana Pendanaannya Tahun 2025-2029	52
Tabel 4.2.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	74

Tabel 4.3.	Rumus Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Urusan	75
Tabel 4.4	Target Indikator Kinerja Kunci Urusan Pangan dan Pertanian Tahun 2025-2029	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Konsep Renstra PD berdasarkan Inmendagri 02 Tahun 2025	2
Gambar 2.1.	Bagan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	10
Gambar 2.2	Pohon Masalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

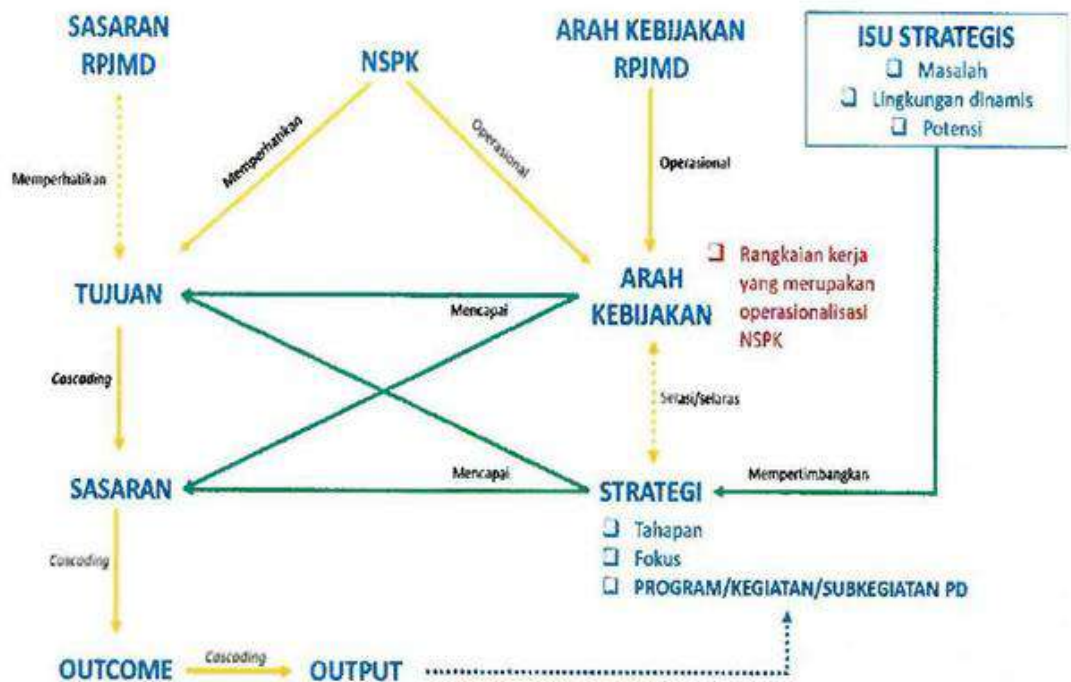
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD dan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen melakukan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, sebagai dokumen yang memberikan arah pembangunan pertanian dan pangan di Kabupaten Kebumen dan menjadi pedoman bagi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dalam menyusun rencana kerja perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu 5 tahun.

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tentang visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Secara operasional Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 harus mendukung dan bersinergis kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dilaksanakan berdasarkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

Proses penyusunan Renstra dilaksanakan dengan tahapan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 meliputi tata cara penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029. Konsep Renstra PD berdasarkan Inmendagri 02 Tahun 2025 sebagaimana pada gambar berikut :



Gambar 1.1.

Konsep Renstra PD berdasarkan Inmendagri 02 Tahun 2025

Penyusunan dokumen Renstra tahun 2025-2029 sangat penting karena dokumen ini sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, serta pengendalian dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun untuk mewujudkan visi dan misi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dokumen ini memuat strategi, kebijakan, dan program prioritas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan potensi daerah, dan mengatasi berbagai permasalahan pembangunan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 mengacu pada beberapa landasan hukum yang terkait dan masih berlaku. Beberapa landasan hukum tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 28. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1499);
 29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
 30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 113);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

- (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 205);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2023-2053 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 208);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);
 41. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan

dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen di bidang pertanian dan pangan.

Dokumen Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan maksud:

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas Pertanian dan Pangan;
2. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Pertanian dan Pangan dalam jangka menengah;
3. Sebagai dasar penilaian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Merumuskan Arah, Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanian dan Pangan berdasarkan Tupoksi dan Evaluasi hasil pembangunan 5 (lima) tahun sebelumnya serta berdasarkan kebijakan umum pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD.
2. Merumuskan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen beserta target pencapaian selama kurun waktu 5 (lima) tahun.
3. Merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan beserta target kinerja dan kerangka pendanaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 terdiri dari 5 bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang penyusunan renstra, landasan hukum yang diacu, maksud dan tujuan penyusunan renstra serta sistematika penulisan.
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEBUMEN
	Pada bab ini terbagi menjadi dua subbab yaitu Gambaran Pelayanan dan Permasalahan serta Isu Strategis.
	Gambaran Pelayanan menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumberdaya yang dimiliki, kinerja pelayanan dan kelompok sasaran layanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen. Permasalahan dan Isu Strategis menguraikan tentang permasalahan pelayanan dan isu strategis dinas pertanian dan pangan kabupaten kebumen.
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	Pada bab ini menguraikan, tujuan, sasaran, stategi dan

	arah kebijakan.
BAB VI	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Pada bab ini menguraikan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator, target dan pagu indikatif serta target keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)
BAB V	PENUTUP Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEBUMEN

2.1 Gambaran Pelayanan

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Kebumen Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan. Dalam Pasal 3 Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan;
- b. Perumusan kebijakan di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan;
- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- g. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPT pada Dinas; dan
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Sesuai dengan telaah kebutuhan struktur organisasi dalam pelaksanaan RPJMD/Renstra draft struktur organisasi Distapang Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

- 4) pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- 5) Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
- 6) Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 7) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas;
- 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pengelompokan fungsi Sekretariat sebagai berikut:

- a) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
- b) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang keuangan.
- c) Tim Kerja Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan.

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen memiliki 4 Bidang yaitu sebagai berikut:

1. Bidang Penyuluhan

Bidang Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kelembagaan petani dan kelembagaan penyuluhan, pembiayaan pertanian, perizinan, perlindungan petani, sarana penyuluhan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia pertanian.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan program penyuluhan;
- b) Pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- c) Pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- d) Pembimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian;
- e) Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani;
- f) Pembinaan, pengawasan dan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis bidang pertanian dan peternakan;
- g) Penyediaan dan pemanfaatan sarana penyuluhan;
- h) Penyelenggaraan promosi, percontohan, dan sekolah lapang;
- i) Pelaksanaan kegiatan asuransi usaha tani;
- j) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan; dan
- k) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pengelompokan fungsi Bidang Penyuluhan terdiri atas:

- 1) Tim Kerja Sarana Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang sarana penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia.
 - 2) Tim Kerja Kelembagaan dan Pembiayaan Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang kelembagaan dan pembiayaan pertanian.
 - 3) Tim Kerja Perizinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perizinan.
2. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian
- Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi sarana dan prasarana pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian, perlindungan lahan pertanian, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan kebijakan di bidang sarana dan prasarana;
- b) Penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- c) Pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan;
- d) Pengelolaan kawasan pertanian berkelanjutan;
- e) Pengelolaan irigasi pertanian;
- f) Pengelolaan sarana dan prasarana balai penyuluh pertanian, pusat kesehatan hewan dan rumah potong hewan;
- g) Penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- h) Pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana; dan
- i) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pengelompokan fungsi Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian terdiri atas:

- 1) Tim Kerja Sarana Pertanian
Subkoordinator Sarana Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang sarana pertanian.
- 2) Tim Kerja Pengelolaan Lahan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Subkoordinator Pengelolaan Lahan dan Pengembangan Prasarana Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan lahan dan pengembangan prasarana pertanian.

- 3) Tim Kerja Penyediaan Prasarana Pertanian
Subkoordinator Penyediaan Prasarana Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang penyediaan prasarana pertanian.
3. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perbenihan, perlindungan, produksi, penanganan pascapanen di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
Dalam melaksanakan tugas, Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyusunan kebijakan perbenihan, perlindungan, produksi, penanganan pascapanen di bidang tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
 - b) perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
 - c) pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
 - d) pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
 - e) pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
 - f) pemberian bimbingan pascapanen di bidang tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
 - g) pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan hortikultura dan perkebunan; dan
 - h) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pengelompokan fungsi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri atas:

 - 1) Tim Kerja Perbenihan dan Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman.
 - 2) Tim Kerja Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang produksi.
 - 3) Tim Kerja Penanganan Pasca Panen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang penanganan pasca panen.
4. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kawasan peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, otoritas veteriner, sumber daya, pemberdayaan peternakan dan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan, pengembangan wilayah sumber bibit ternak/galur ternak, pakan, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, kesehatan hewan dan perlindungan;
- b) Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- c) Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan galur ternak;
- d) Pengendalian dan penanganan risiko penyakit hewan, zoonosis dan kesehatan masyarakat veteriner;
- e) Pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
- f) Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- g) Pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- h) Peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan;
- i) Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- j) Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat;
- k) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- l) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pengelompokan fungsi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas:

1) Tim Kerja Perbibitan dan Produksi Peternakan

Subkoordinator Perbibitan dan Produksi Peternakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perbibitan dan produksi peternakan.

2) Tim Kerja Kesehatan Hewan

Subkoordinator Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang kesehatan hewan.

3) Tim Kerja Kesehatan Masyarakat Veteriner

Subkoordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian,

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang kesehatan masyarakat veteriner.

5. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, penanganan kerawanan pangan serta pengawasan keamanan pangan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Identifikasi, inventarisasi, pengolahan data, penyusunan, analisis dan kajian kebijakan daerah di bidang pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, penanganan kerawanan pangan serta pengawasan keamanan pangan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, penanganan kerawanan pangan serta pengawasan keamanan pangan;
- 3) pengoordinasian kebijakan daerah di bidang pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, penanganan kerawanan pangan serta pengawasan keamanan pangan;
- 4) peningkatan sumber daya manusia di bidang pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, penanganan kerawanan pangan serta pengawasan keamanan pangan;
- 5) pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, penanganan kerawanan pangan serta pengawasan keamanan pangan;
- 6) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
Pengelompokan fungsi Bidang Ketahanan Pangan terdiri atas:
 - a) Tim Kerja Infrastruktur Kemandirian Pangan dan Kerawanan Pangan
Subkoordinator Infrastruktur Kemandirian Pangan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang infrastruktur kemandirian pangan dan kerawanan pangan.
 - b) Tim Kerja Distribusi dan Cadangan Pangan
Subkoordinator Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian,

- pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang distribusi dan cadangan pangan.
- c) Tim Kerja Diversifikasi dan Keamanan Pangan
Subkoordinator Diversifikasi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang diversifikasi dan keamanan pangan.
6. Unit Pelaksana Teknis
- Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
 - Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
7. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya. Subkoordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugas, Subkoordinator dibantu oleh jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan serta jabatan pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Sumberdaya Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen

2.1.3.1 2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Sumberdaya Manusia

Jumlah ASN pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen akhir Desember 2024 berjumlah 178 orang yang terdiri dari 4,49 % struktural, 50 % Jabatan Fungsional Tertentu dan 45,51 % Jabatan Fungsional Umum dari jumlah ASN. Data Kepegawaian berdasarkan eselon dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut:

Tabel 2.1.
Kepegawaian Berdasarkan Eselon Tahun 2024

No	Uraian	Struktural	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Fungsional Umum	Jumlah
1.	Kepala	1	0	0	1
2.	Sekretariat	3	1	11	15
3.	Bidang Ketahanan Pangan	1	4	1	6
4.	Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian	1	1	0	2

No	Uraian	Struktural	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Fungsional Umum	Jumlah
5.	Bidang Tanaman Hortikultura dan Perkebunan	1	3	0	4
6.	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1	13	2	16
7.	Bidang Penyuluhan	0	67	67	134
8.	Kelompok Jabatan Fungsional	0	0	0	0
	Total	8	89	81	178

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen (Data Simpeg Diolah Desember 2024).

Berdasarkan pendidikannya ASN pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen terdiri dari 6,18 % S2, 59,55 % S1, 7,3 % D3, 26,97% SMA, dan 0% SMP dari total ASN berjumlah 178 Orang. Data kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2.
Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No.	Uraian	S2	S1	D3	SMA	SMP	Jumlah
1.	Kepala	1					1
2.	Sekretariat	1	4	1	9	0	15
3.	Bidang Ketahanan Pangan	1	5	0	0	0	6
4.	Bidang Sarana, Prasarana Pertanian	0	2	0	0	0	2
5.	Bidang Tanaman Hortikultura dan Perkebunan	1	2	1	0	0	4
6..	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	2	13	1	0	0	16
7.	Bidang Penyuluhan	5	80	10	39	0	134
8.	Kelompok Jabatan Fungsional						0
	Total	11	106	13	48	0	178

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen (Data Simpeg Diolah Desember 2024).

Berdasarkan golongan ASN Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen terdiri dari 8,99% golongan IV, 61,24% golongan III, dan 29,78% golongan II dari total ASN, secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3.
Kepegawaian Berdasarkan Golongan Tahun 2024

No.	Uraian	Golongan			Jumlah
		IV (empat)	III (tiga)	II (dua)	
1.	Kepala	1			1
2.	Sekretariat	1	10	4	15
3.	Bidang Ketahanan Pangan	2	4		6
4.	Bidang Sarana, Prasarana Pertanian	0	2		2
5.	Bidang Tanaman Hortikultura dan Perkebunan	1	3		4
6.	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	3	13		16
7.	Bidang Penyuluhan	8	77	49	134
8.	Kelompok Jabatan Fungsional	0	0	0	0
	Total	16	109	53	178

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen (Data Simpeg Diolah Desember 2024)

Berdasarkan jenis kelamin ASN Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen terdiri dari 49,44% berjenis kelamin laki – laki dan 50,56% berjenis kelamin perempuan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4.
Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Uraian	Struktural		Jabatan Fungsional Tertentu		Jabatan Fungsional Umum		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P

No	Uraian	Struktural		Jabatan Fungsional Tertentu		Jabatan Fungsional Umum		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Kepala	1						1	0
2.	Sekretariat	2	1		1	8	3	10	5
3.	Bidang Ketahanan Pangan		1	1	3		1	1	5
4.	Bidang Sarana, Prasarana Pertanian	1			1			1	1
5.	Bidang Tanaman Hortikultura dan Perkebunan	1		2	1			3	1
6.	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan		1	4	9	1	1	5	11
7.	Bidang Penyuluhan			67	67			67	67
8.	Kelompok Jabatan Fungsional							0	0
	Total	5	3	74	82	9	5	88	90

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen (Data Simpeg Diolah Desember 2024)

Secara kuantitas pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen belum mencukupi untuk melaksanakan kinerja secara lebih baik. Secara kualitas mayoritas pegawai berpendidikan S1, menunjukkan tingkat kompetensi akademik yang cukup tinggi dan tidak ada pegawai berpendidikan SMP ke bawah, menunjukkan standar pendidikan minimal cukup baik. Kualitas SDM secara umum baik dan terdidik, dengan dominasi lulusan perguruan tinggi. Namun, perlu peningkatan kompetensi lanjutan (pelatihan teknis atau pascasarjana) terutama untuk pegawai SMA/D3 agar mendukung profesionalitas dan karier. Komposisi gender hampir seimbang, Jabatan Fungsional Tertentu justru lebih banyak diisi perempuan menunjukkan peningkatan partisipasi perempuan di bidang teknis dan profesional. Jabatan Struktural dan Fungsional Umum masih lebih banyak laki-laki, yang umum terjadi karena peran mobilitas dan teknis di lapangan.

Walaupun secara kualitas secara umum baik dan secara gender sudah seimbang namun dari segi kuantitas masih belum mencukupi. Guna mengatasi kekurangan Aparatur Sipil Negara di Dinas Pertanian dan Pangan dilakukan pemenuhan kebutuhan dengan Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan (P2K K/L) sejumlah 97 orang dengan rincian sebagaimana Tabel 2.5. berikut ini.

Tabel 2.5.

Petugas Penunjang Kegiatan (P2K) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	Uraian	Pendidikan						Jenis Kelamin		Jml
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	L	P	
1.	Sekretariat	0	9	1	6	0	0	9	7	16
2.	Bidang Ketahanan Pangan	0	5	1	2	0	0	4	4	8
3.	Bidang Sarana, Prasarana Pertanian	0	6	1	0	0	0	2	5	7
4.	Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	0	4	1	0	0	0	2	3	5
6.	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	0	22	3	2	3	1	20	11	31
7.	Bidang Penyuluhan	0	26	0	3	1	0	17	13	30
	Jumlah	0	72	7	13	4	1	54	43	97

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen (Data diolah), 2024

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap kelancaran kinerja sebuah instansi dimana pelayanan tidak akan maksimal apabila sarana prasarana kurang memadai. Kondisi sarana prasarana saat ini dirasakan belum cukup memadai disamping itu banyak sarana prasarana yang perlu peremajaan dan tentunya perlu pemeliharaan setiap tahunnya. Secara detail kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki berdasarkan data akhir tahun 2024 disajikan pada tabel 2.6.

Tabel 2.6.
Data Sumber Daya Sarana dan Prasarana Tahun 2024 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen

No	Jenis Sarpras	Kondisi				Kebutuhan	Perlu Penambahan	Perlu Pemeliharaan
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
a.	Tanah	22	-	-	22	24	2	-
b.	Gedung	38	10	4	52	54	2	52
c.	Kendaraan Roda 4		8	-	8	10	2	8
d.	Kendaraan Roda 3	1	-	-	1	1	-	1
e.	Kendaraan Roda 2	65	10	3	78	83	5	75
f.	Peralatan dan perlengkapan gedung							

No	Jenis Sarpras	Kondisi				Kebutuhan	Perlu Penambahan	Perlu Pemeliharaan
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kantor :							
	1. PC Komputer	7	2	-	9	38	19	9
	2. Laptop	70	41	30	141	205	94	111
	3. Printer	85	20	14	119	173	68	105
	4. Note Book	2	-	2	4	2	-	-
	5. Televisi	10	1	-	11	10	-	11
	6. Kulkas	22	-	2	24	27	5	22
	7. Kipas angin	5	-	5	10	5	-	-
	8. AC	44	-	2	46	50	6	44
	9. LCD	20	-	15	35	35	15	10
	10. Faksimile	1	-	1	2	1	-	1
	11. Mesin ketik	-	-	9	9	-	-	-
	12. Pesawat telepon	1	-	-	1	1	-	1
	13. Wirelles	44	-	-	44	44	-	-
	14. Kamera Digital	54	-	5	59	59	-	-
	15. Handycam	27	-	5	32	35	8	-
	16. Brankas	2	-	-	2	2	-	-
	17. Meja Pejabat Eselon III	11	1	-	12	12	1	-
	18. Meja Pejabat Eselon IV	22	10	-	32	45	13	-
	19. Meja Biro	-	-	-	-	-	-	-
	20. Meja 1/2 Biro	24	-	-	24	24	-	-
	21. Meja Panjang/Meja Rapat	75	30	-	105	167	62	-
	22. Meja Kerja	48	10	-	58	70	22	-
	23. Kursi Eselon II	-	1	-	1	1	1	-
	24. Kursi Eselon III	-	12	-	12	12	6	-
	25. Kursi Eselon IV	20	15	-	35	45	15	-
	26. Kursi Lipat	251	250	109	610	251	-	-
	27. Kursi Kayu	7	20	-	27	7	-	-
	28. Kursi Putar	25	25	-	50	50	25	-
	29. Almari Kayu	8	-	-	8	50	42	-
	30. Almari Kaca	9	-	-	9	9	-	-
	31. Filing Kabinet	31	-	2	33	31	-	-
	32. Kursi Tamu/Kursi Deret	13	-	-	13	20	7	-
	33. Spfa/Mebelair	5	-	-	5	5	-	-
	34. GPS	18	-	11	29	29	-	-

No	Jenis Sarpras	Kondisi				Kebutuhan	Perlu Penambahan	Perlu Pemeliharaan
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35.Modem	22	-	31	53	53	-	-
	36.Gordyn dan Taplak	70	-	10	80	100	30	-
	37.Sound System	15	-	-	15	38	23	-
	38.CCTV	5	-	-	5	10	5	-
	39.Jaringan distribusi Tegangan	1	-	-	1	1	-	-
	40.Mebelair Fron Office	1	-	-	1	1	-	-
	41.Lemari Arsip	6	-	-	6	6	-	-
	42.Meja Kerja	40	-	-	40	70	30	-
	43.Kursi Kerja	40	10	5	55	70	20	-
	44.Mega Phone	3	-	-	3	3	-	-
	45.Scaner	8	-	-	8	10	2	-
	46.Genset	9	2	-	11	10	1	2
	47.Kursi Rapat	255	75	34	364	510	255	-
g.	Alat-alat Pertanian :							
	1. Moster Tester	26	-	-	26	26	-	-
	2. Traktor	2	-	-	2	2	-	1
	3. Moster Tester Padi	7	-	-	7	27	20	-
	4. Moster Tester Palawija	-	-	-	-	26	26	-
	5. Timbangan 100 kg	8	-	-	8	10	2	-
	6. PH Tanah	28	-	-	28	28	-	-
	7. Alat Pengereng	-	-	-	-	-	-	-
	8. Kompor Gas	19	-	-	19	19	-	-
	9. Pemotong Rumput	28	-	-	28	28	-	-
	10.Gerobag Daging	10	-	-	10	10	-	-
	11.Arco	15	-	-	15	28	13	-

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen (Data diolah), 2024

Berdasarkan table terlihat bahwa beberapa sarana prasarana penting dalam pelayanan administrasi perkantoran dan kinerja lainnya perlu penambahan dan pemeliharaan. Dinas Pertanian dan Pangan perlu melakukan pemeliharaan sarana prasarana yang dimiliki, dan masih membutuhkan beberapa kelengkapan antara lain :

- 1) Masih diperlukan penambahan lahan dan gedung baru untuk Puskesmas (Pusat Kesehatan Hewan) serta program rehabilitasi gedung lainnya yang sudah ada.

- 2) Kendaraan dinas relatif cukup, namun masih membutuhkan kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat tambahan serta pemeliharaan rutin.
- 3) Peralatan teknologi informasi memerlukan pembaruan dan pengadaan tambahan karena sebagian sudah berat. Prioritas pada PC, laptop, printer, scanner, LCD, handycam, soundsystem dan CCTV.
- 4) Peralatan, pelengkapan dan mesin juga diperlukan seperti kulkas, AC dan genset.
- 5) Diperlukan penambahan dan pemeliharaan mebel agar standar ruang kerja dan pelayanan publik meningkat. Prioritas kebutuhan pada kursi dan meja rapat, serta almari penyimpanan.
- 6) Alat alat pertanian masih kurang cukup besar terutama moster tester padi/palawija yang penting untuk kegiatan uji mutu hasil dan mobilitas petugas di lapangan. Alat lain seperti arco dan timbangan 100 kg juga masih dibutuhkan.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen

2.1.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, gambaran pelayanan yang telah dilakukan dapat dicerminkan berdasarkan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada renstra periode 2021-2026. Secara detail dan lengkap, data capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 2.7.

Tabel 2.7.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Satuan	Target Indikator Lainnya (IKU)	Target Restra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Persentase Capaian			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Kenaikan Ketersediaan Energi Pangan dan Protein Pangan	-	%	1,00	1,00	2,00	3,00	4,00	1,99	5,62	6,52	4,50	199,00	281,00	217,33	112,50
2	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Pertanian	-	%	1,00	1,00	2,00	3,00	4,00	12,89	6,68	15,98	14,33	1289	334	532,67	358,25

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen (Data diolah), 2024



Berdasarkan data tabel di atas, berkaitan dengan urusan pangan dan urusan pertanian dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Persentase Kenaikan Ketersediaan Energi Pangan dan Protein Pangan
Indikator kinerja persentase Kenaikan Ketersediaan Energi Pangan dan Protein Pangan Kabupaten Kebumen telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan
- b. Persentase Peningkatan Nilai Produksi Pertanian
Indikator kinerja persentase peningkatan nilai produksi pertanian Kabupaten Kebumen telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan

2.1.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen

Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen tahun 2021-2024 secara umum masuk dalam kategori cukup baik. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Capaian kinerja keuangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2024 sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
Rata-rata rasio capaian pada indikator penanganan kerawanan pangan mencapai angka 177,55 %. Angka tersebut menunjukkan capaian realisasi anggaran pada Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan melebihi jumlah anggaran yang direncanakan.
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Rata-rata rasio capaian pada indikator tersebut mencapai angka 55,30 %. Angka tersebut menunjukkan capaian realisasi anggaran pada Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat belum mendekati jumlah anggaran yang direncanakan.
3. Program Penanganan Kerawanan pangan
Rata-rata rasio capaian pada indikator tersebut mencapai angka 95,24%. Angka tersebut menunjukkan capaian realisasi anggaran pada Penanganan Kerawanan pangan hampir mendekati jumlah anggaran yang direncanakan.
4. Program Pengawasan Keamanan pangan
Rata-rata rasio capaian pada indikator tersebut mencapai angka 74,18%. Angka tersebut menunjukkan capaian realisasi anggaran Program Pengawasan Keamanan pangan belum mendekati jumlah anggaran yang direncanakan.
5. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah kabupaten/Kota
Rata-rata rasio capaian pada indikator Penunjang Urusan pemerintahan Daerah kabupaten/Kota mencapai angka 108,29 %. Angka tersebut menunjukkan capaian realisasi anggaran pada Penunjang Urusan pemerintahan melebihi jumlah anggaran yang direncanakan.

6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Rata-rata rasio capaian pada indikator tersebut mencapai angka 64,54%. Angka tersebut menunjukkan capaian realisasi anggaran Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian belum mendekati jumlah anggaran yang direncanakan.
7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Rata-rata rasio capaian pada indikator tersebut mencapai angka 80,15%. Angka tersebut menunjukkan capaian realisasi anggaran Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian belum mendekati jumlah anggaran yang direncanakan.
8. Program pengendalian keehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
Rata-rata rasio capaian pada indikator tersebut mencapai angka 115,24%. Angka tersebut menunjukkan capaian realisasi anggaran Program pengendalian keehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner melebihi jumlah anggaran yang direncanakan.
9. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Rata-rata rasio capaian pada indikator tersebut mencapai angka 64,37%. Angka tersebut menunjukkan capaian realisasi anggaran Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian belum mendekati jumlah anggaran yang direncanakan.
10. Program Perizinan Usaha Pertanian
Rata-rata rasio capaian pada indikator tersebut mencapai angka 45,24%. Angka tersebut menunjukkan capaian realisasi anggaran Program Perizinan Usaha Pertanian belum mendekati jumlah anggaran yang direncanakan.
11. Program Penyuluhan Pertanian
Rata-rata rasio capaian pada indikator tersebut mencapai angka 75,60%. Angka tersebut menunjukkan capaian realisasi anggaran Program Penyuluhan Pertanian belum mendekati jumlah anggaran yang direncanakan.

Secara lengkap, data capaian realisasi pendanaan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.8

Tabel 2.8.
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen

No	Uraian	Anggaran				Realisasi Anggaran				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran				Rerata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
A	Persentase Kenaikan Ketersediaan Energi Pangan dan Protein Pangan	27.435.464.000	19.201.445.000	20.159.202.000	20.460.134.000	3.336.893.457	28.930.566.355	20.297.988.279	19.888.879.881	0,12	1,51	1,01	0,97	21.814.061.250,00	18.113.581.993,00
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	1.255.837.000	1.335.000.000	1.569.503.000	1.461.416.000	1.074.188.600	8.257.846.895	39.661.300	52.297.175	0,86	6,19	0,03	0,04	1.405.439.000,00	2.355.998.492,50
2.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.047.741.000	1.839.000.000	1.733.462.000	1.793.041.000	1.812.105.200	1.117.198.362	656.389.787	611.360.467	0,88	0,61	0,38	0,34	1.853.311.000,00	1.049.263.454,00
3.	Program Penanganan Kerawanan pangan	350.352.000	875.000.000	666.335.000	686.948.000	331.329.157	483.638.680	1.087.099.670	466.959.909	0,95	0,55	1,63	0,68	644.658.750,00	592.256.854,00
4.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	120.969.000	170.000.000	155.000.000	162.000.000	119.270.500	142.510.262	94.017.500	86.912.000	0,99	0,84	0,61	0,54	151.992.250,00	110.677.565,50
5.	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	23.660.565.000	14.982.445.000	16.034.902.000	16.356.729.000	18.406.698.140	18.929.372.156	18.420.820.022	18.671.350.330	0,78	1,26	1,15	1,14	17.758.660.250,00	18.607.060.162,00
B	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Pertanian	61.647.161.000	39.131.357.000	38.876.415.000	38.926.073.000	54.497.742.118	22.965.729.433	30.111.302.187	27.319.928.369	0,88	0,59	0,77	0,70	44.645.251.500,00	33.723.675.526,75
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.884.210.000	14.768.800.000	13.179.151.000	11.593.629.000	1.823.844.728	5.610.453.008	13.243.058.961	2.654.421.622	0,97	0,38	1,00	0,23	10.356.447.500,00	5.832.944.579,75

No	Uraian	Anggaran				Realisasi Anggaran				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran				Rerata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	30.620.981.000	17.452.217.000	19.332.133.000	20.766.710.000	29.026.851.199	11.823.593.273	11.954.769.729	19.981.012.305	0,95	0,68	0,62	0,96	22.043.010.250,00	18.196.556.626,50
3.	Program pengendalian keehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	923.581.000	1.305.788.000	1.349.927.000	1.399.179.000	781.521.280	877.794.645	1.969.164.086	2.283.826.447	0,85	0,67	1,46	1,63	1.244.618.750,00	1.478.076.614,50
4.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	845.760.000	565.000.000	1.559.275.000	1.398.375.000	834.520.666	534.549.460	561.182.620	394.283.700	0,99	0,95	0,36	0,28	1.092.102.500,00	581.134.111,50
5.	Program Perizinan Usaha Pertanian		100.000.000	103.000.000	106.090.000		96.607.700	49.367.250	38.644.200		0,97	0,48	0,36	77.272.500,00	46.154.787,50
6.	Program Penyuluhan Pertanian	3.712.064.000	4.939.552.000	3.352.929.000	3.662.090.000	3.624.306.105	4.022.731.347	2.333.759.541	1.967.740.095	0,98	0,81	0,70	0,54	3.916.658.750,00	2.987.134.272,00

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok layanan sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen merupakan penerima manfaat dan target utama dari program, kegiatan, dan kebijakan sektor pertanian. Secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Petani
- b. Peternak
- c. Pelaku Usaha Pertanian
- d. Pelaku Usaha Pangan segar asal tumbuhan dan hewan
- e. Pelaku Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan
- f. Masyarakat Miskin dan Rawan Pangan
- g. Masyarakat rawan bencana alam dan sosial
- h. Masyarakat terdampak gejolak harga

2.1.5 Mitra Dinas Pertanian dan Pangan dalam Memberikan Pelayanan

Mitra Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen merupakan pihak-pihak yang menjadi mitra dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi dalam rangka pembangunan pertanian. Berikut daftar Mitra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen :

- a. DPR
- b. TNI Polri
- c. Kementerian Pertanian
- d. Kementerian PUPR
- e. Bapanas
- f. BPS
- g. DPRD Provinsi/Kabupaten
- h. Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi
- i. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi
- j. Bulog
- k. PT Pupuk Indonesia
- l. BUMN/BUMD
- m. Perguruan Tinggi

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen

Permasalahan merupakan pernyataan keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen selengkapnya disajikan pada Tabel 2.9

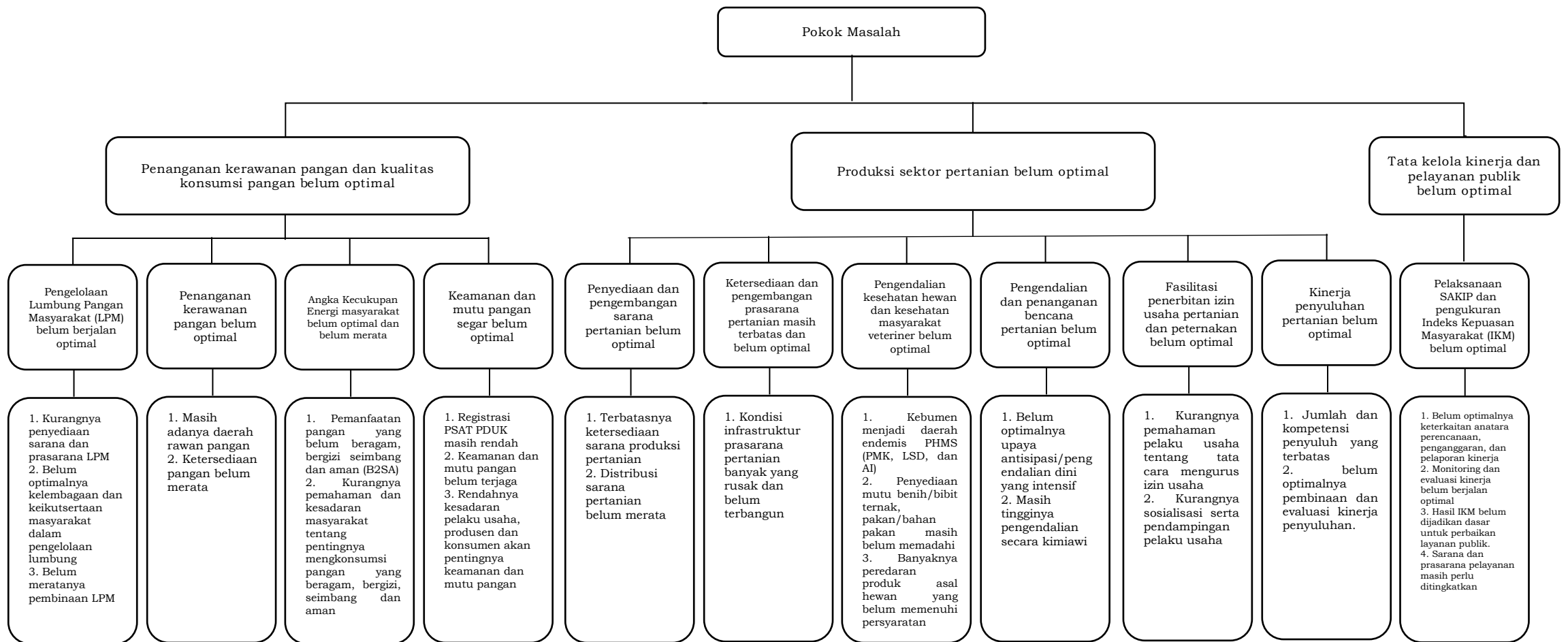
Tabel 2.9.
 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan
 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	SERABUT MASALAH
1	2	3	4	5
1.	Ketahanan Pangan Daerah masih rendah	Penanganan kerawanan pangan dan kualitas konsumsi pangan belum optimal	Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) belum berjalan optimal	1. Kurangnya penyediaan sarana dan prasarana LPM 2. Belum optimalnya kelembagaan dan keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan lumbung 3. Belum meratanya pembinaan LPM
			Penanganan kerawanan pangan belum optimal	1. Masih adanya daerah rawan pangan 2. Ketersediaan pangan belum merata
			Angka Kecukupan Energi masyarakat belum optimal dan belum merata	1. Pemanfaatan pangan yang belum beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) 2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman
			Keamanan dan mutu pangan segar belum optimal	1. Registrasi PSAT PDUK masih rendah 2. Keamanan dan mutu pangan belum terjaga 3. Rendahnya kesadaran pelaku usaha, produsen dan konsumen akan pentingnya keamanan dan mutu pangan
2.	Daya saing ekonomi sektor pertanian masih rendah	Produksi sektor pertanian belum optimal	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian belum optimal	1. Terbatasnya ketersediaan sarana produksi pertanian 2. Distribusi sarana pertanian belum merata

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	SERABUT MASALAH
1	2	3	4	5
			Ketersediaan dan pengembangan prasarana pertanian masih terbatas dan belum optimal	1. Kondisi infrastruktur prasarana pertanian banyak yang rusak dan belum terbangun
			Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner belum optimal	1. Masih menjadi daerah endemis PHMS (PMK, LSD, dan AI) 2. Penyediaan mutu benih/bibit ternak, pakan/bahan pakan masih belum memadai 3. Banyaknya peredaran produk asal hewan yang belum memenuhi persyaratan teknis
			Meningkatnya pengendalian dan penanganan bencana pertanian	1. Belum optimalnya upaya antisipasi/pengendalian dini yang intensif 2. Masih tingginya pengendalian secara kimiawi
			Fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian dan peternakan belum optimal	1. Kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang tata cara mengurus izin usaha 2. Kurangnya sosialisasi serta pendampingan pelaku usaha
			Kinerja penyuluhan pertanian belum optimal	1. Jumlah dan kompetensi penyuluh yang terbatas 2. Belum optimalnya pembinaan dan evaluasi kinerja penyuluhan.

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, 2024

Permasalahan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen yang masih dihadapi dan mungkin terjadi pada tahun 2025-2029 dapat dilihat pada pohon masalah berikut :



Gambar 2.2. Pohon Masalah Dinas Pertanian dan pangan Kabupaten Kebumen

2.2.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen mendukung pencapaian Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Kebumen Berdaya : Kebumen Beriman- Maju – Sejahtera - Berbudaya

1. **Beriman**, Kebumen Beriman sejatinya mengembalikan daya ingat dan rasa memiliki yang sepenuh hati, bahwa Kabupaten Kebumen merupakan daerah agamis ditandai dengan banyaknya pesantren dan pendidikan keagamaan yang senantiasa menjadi spirit moral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berbasis pada nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal yang mengarusutamakan sikap moderat, toleran, berkeadilan dan saling tolong-menolong
2. **Maju**, Terbangunnya sistem dan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi dan ngayemi dengan dukungan ASN yang berkualitas menuju reformasi birokrasi yang kuat melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), keterbukaan informasi publik yang aksesibel, adanya ruang ekspresi kaum muda melalui tekno kreatif, optimalisasi digitalisasi transaksi pendapatan asli daerah, mendudukkan desa sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, serta adanya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar berdasar kondisi geografis wilayah dan terwujudnya daerah yang tangguh terhadap bencana.
3. **Sejahtera**, Masyarakat terlindungi dan terjamin kebutuhan dasarnya baik lahir maupun batin yang meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya yang didukung peningkatan daya saing ekonomi sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata dan UMKM sesuai potensi lokal dan berbasis digital guna mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat Kebumen sekaligus keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan.
4. **Berbudaya**, Pembangunan Kebumen Berbudaya dilakukan untuk memperkuat budaya lokal yang dimiliki guna menjaga jatidiri Kebumen Beriman. Masyarakat Kebumen sejatinya memiliki modal sosial besar dalam hal keswadayaan, gotong royong, partisipasi serta kekuatan nilai-nilai keagamaan (relegiusitas) yang ditandai keberadaan pesantren dan pendidikan keagamaan dalam mewujudkan kehidupan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dan Kebumen sebagai bumi tua tentu banyak peninggalan bersejarah yang harus dilestarikan dan dikembangkan sebagai kekuatan jatidiri masyarakat Kebumen. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan, maka dijabarkan dalam misi sebagai berikut:

- 1) **MISI 1 : Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Berkeadilan dan Inklusif.** Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Sejahtera, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan tidak terbagi pilih (inklusif), melalui kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan, jaminan kemudahan dan kualitas pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan, pengurangan pengangguran, pembangunan berkeadilan gender, disabilitas dan inklusi sosial.
- 2) **MISI 2 : Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM yang Inovatif dan Berkelanjutan.** Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Sejahtera, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah meningkatkan produktivitas sektor pertanian dalam arti luas, pengembangan pariwisata, UMKM serta optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan yang berwawasan lingkungan dengan didukung penuh pengembangan sistem digitalisasi.
- 3) **MISI 3 : Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.** Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Maju, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah percepatan pembangunan infrastruktur dasar, di antaranya membangun infrastruktur untuk akses sanitasi aman, akses air minum aman, akses hunian layak, akses menuju pusat layanan dasar terutama pada wilayah kantong-kantong kemiskinan dan pusat pengembangan ekonomi sesuai kondisi geografis, percepatan pembangunan infrastruktur desa dan kawasan perdesaan, serta pembangunan daerah tangguh bencana melalui pelestarian lingkungan.
- 4) **MISI 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi dan ngayemi.** Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Maju, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah mewujudkan reformasi birokrasi yang salah satunya dengan menerapkan sistem merit, memperkuat partisipasi dan keterbukaan informasi publik berbasis digital/SPBE yang aksesibel, adanya ruang ekspresi kaum muda melalui tekno-kreatif, optimalisasi digitalisasi transaksi PAD dan mendudukkan desa sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
- 5) **MISI 5 : Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, dan rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal.** Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Berbudaya. Seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kebumen harus mencerminkan jati diri Kebumen Beriman, dimana nilai-nilai agama dan budaya lokal sebagai kunci utama mewujudkan Kebumen yang guyub, rukun, damai, tertib dan aman. Agenda kerja yang dilakukan adalah memperkuat dan mengembangkan adat-istiadat, tradisi budaya lokal Kebumen, mengembangkan karya dan kesenian tradisional khas

Kebumen, pelestarian cagar budaya dan optimalisasi fasilitasi pengembangan pesantren dan pendidikan keagamaan.

Langkah-langkah Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas melalui 15 program unggulan yaitu :

1. Cerdas Dan Sehat Bareng Biyunge
2. Mangan Wareg Dan Bergizi
3. Sregep Ngode
4. Biyunge Momong
5. Perempuan Berdaya
6. Plesir Bareng & Bakulan Laris
7. Petani Makmur dan Swadaya Pangan
8. Njamu Bergas
9. Lingkungan Bersih Lestari
10. ASN Nyaman, Terampil dan Inovatif
11. Ngobrol & Rembug Bareng Biyunge
12. Desa Berdaya
13. Anak Soleh
14. Muda Kreatif (Anake Biyunge)
15. AYEM, TENTREM, GUYUB, RUKUN

Dari penjabaran visi dan misi tersebut di atas peran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen adalah mendukung dan menyukseskan misi ke-1 (Satu) dan ke-2 (Dua) yaitu Misi 1 Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Berkeadilan dan Inklusif; Misi 2 Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM yang Inovatif dan Berkelanjutan dengan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilaksanakan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen adalah Program Mangan Wareg Dan Bergizi dan Petani Makmur dan Swadaya Pangan.

Program unggulan yang dapat diakomodir dalam Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 2.10

Sinkronisasi Program Unggulan Bupati Kebumen dengan Program Distapang Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

No	Program Unggulan	Penjabaran Program Unggulan/Sub Program	Indikasi Rencana Operasional	Program	Sasaran	Koordinator dan OPD Pelaksana
1.	MANGAN WAREG DAN BERGIZI	Program ini difokuskan untuk Meningkatkan kualitas pangan dan gizi melalui: percepatan penanggulangan stunting, gizi kurang, gizi buruk melalui pemenuhan makan bergizi anak, serta gizi keluarga terutama lansia.	- Menyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kecamatan - Menangani desa rawan pangan - Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada daerah rawan pangan - Melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar	PROGRAM: 1. Program Penanganan Kerawanan Pangan 2. Program Pengawasan Keamanan Pangan	Poktan/ Gapoktan/ Kelompok Tani Ternak	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen
2.	PETANI MAKMUR DAN SWADAYA PANGAN	Program ini diprioritaskan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian dalam arti luas dan ketahanan pangan, pemberdayaan petani, dan pembiayaan sector pertanian secara menyeluruh dan meringankan beban petani, mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan agar	- Menyediakan dan Mengembangkan Prasarana Pertanian - Menyediakan dan Mengembangkan sarana Pertanian - Melaksanakan Penyuluhan Pertanian - Memfasilitasi Izin Usaha Pertanian dan Peternakan - Melaksanakan pengendalian dan	PROGRAM 1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 3. Program Penyuluhan Pertanian 4. Program Perizinan Usaha Pertanian 5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 6. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	Poktan/ Gapoktan/ Kelompok Tani Ternak	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen

No	Program Unggulan	Penjabaran Program Unggulan/Sub Program	Indikasi Rencana Operasional	Program	Sasaran	Koordinator dan OPD Pelaksana
		lebih produktif dan meningkatkan pendapatan masyarakat, melalui: pengadaan bibit, pendampingan, dan memfasilitasi kerjasama pemanfaatan lahan dengan pihak terkait	penanganan bencana pertanian - Melaksanakan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner - Menyediakan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan - Menyediakan dan Menyalurkan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya, Mengelola dan Menyeimbangkan Cadangan Pangan serta melaksanakan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Veteriner 7. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 8. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		

Sumber: RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 - 2029 dan Analisis Penyusun 2025(Data Diolah)

Dukungan untuk menyukseskan misi ke-2 dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada urusan pertanian dan pangan. Pada pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka mencapai visi misi itulah sering terjadi beberapa permasalahan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor penghambat maupun faktor pendorong yang berupa faktor internal maupun eksternal. Secara lebih rinci faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11.
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi: Kebumen Berdaya : Kebumen Beriman- Maju – Sejahtera - Berbudaya				
No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
	KDH dan Wakil KDH terpilih		Penghambat	Pendorong
1	Misi 2 Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Sektor Pertanian Dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM yang Inovatif dan Berkelanjutan			
A.	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan			
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	1. Kualitas & kompetensi SDM 2. Data yang belum sesuai dengan kebutuhan (akurat, valid) 3. Kurangnya koordinasi	1. Ketersediaan SDM 2. Sarana & Prasarana yang cukup memadai 3. Hubungan tata kerja antar ASN yang harmonis
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang terkelola dengan baik	1. Perubahan dan anomali iklim tidak menentu menyebabkan penurunan produksi pangan 2. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pangan yang B2SA 3. Tidak stabilnya Harga pangan dan Rendahnya daya beli masyarakat	1. Pemanfaatan inovasi dan teknologi tepat guna 2. Tersedianya potensi pangan lokal 3. Tersedianya fasilitasi distribusi pangan
3.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka Kecukupan Energi		
4.	Program Penangaan Kerawanan Pangan	Presentase penanganan daerah rawan pangan		
5.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Presentase pangan segar aman		

Visi: Kebumen Berdaya : Kebumen Beriman- Maju – Sejahtera - Berbudaya				
No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
	KDH dan Wakil KDH terpilih		Penghambat	Pendorong
B.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian			
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Status dan Luas Kepemilikan Lahan 2. Pendidikan dan Usia Petani 3. Dampak Perubahan Iklim (DPI) 4. Keterbatasan akses pembiayaan bagi petani	1. Tersedianya potensi Sumber daya alam dan sumberdaya manusia 2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai 3. Tersedianya akses permodalan 4. Tersedianya inovasi dan teknologi 5. Tersedianya data dan informasi yang selalu up to date 6. Kebutuhan bahan pangan yang terus meningkat 7. Pangsa pasar produk pertanian 8. Regulasi yang mendukung
2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase ketersediaan Prasarana Pertanian dalam kondisi baik		
3.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penyakit hewan yang tertangani		
4.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Peningkatan pengendalian dan penanganan bencana pertanian		
5.	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase izin usaha Pertanian dan Perternakan		
6.	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase skor Evaluasi Kinerja Penyuluhan Pertanian		

2.2.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

2.2.3.1 Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029

Astacita ke 2 (Dua) Presiden dan Wakil Presiden:

“Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru”

Kementerian Pertanian memiliki tujuan untuk mencapai pertanian yang berkelanjutan, pengelolaan dengan teknologi terkini, dan memberikan manfaat bagi ketersediaan pangan serta kesejahteraan petani dalam rangka mendukung swasembada pangan melakukan intervensi sebagai berikut:

1. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah Daerah
2. Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi)
3. Pengembangan dan Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan)
4. Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura

5. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura
6. Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik
7. Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih & bibit berkualitas/pupuk & pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen
8. Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar & pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi & korporasi petani; pembiayaan dana bergulir & kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama
9. Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian

2.2.3.2 Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 -2029

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah memiliki tujuan Mewujudkan Ketahanan Pangan di Jawa Tengah dengan sasaran Meningkatnya Ketersediaan Pangan, Meningkatnya Keterjangkauan Pangan dan Meningkatnya Pemanfaatan Pangan.

Dukungan Kegiatan dari Dinas Ketahanan Pangan dalam prioritas 4 (pertumbuhan ekonomi) antara lain :

- 1) Fasilitasi Kelembagaan Pangan
- 2) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
- 3) Fasilitasi Distribusi Pangan (termasuk Kios Pangan Murah)
- 4) Fasilitasi Pengembangan Pangan Lokal
- 5) Pengawasan Keamanan Pangan
- 6) Pengawasan Registrasi Pangan
- 7) Pelayanan Registrasi / Sertifikasi Pangan

Dukungan Kegiatan dari Dinas Ketahanan Pangan dalam Prioritas 8 (Kemiskinan) antara lain :

- 1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Daerah Rawan Pangan
- 2) Subsidi Harga Pangan
- 3) Subsidi Pangan Sumber Energi untuk Daerah dengan Angka PoU Tinggi

4) Subsidi Pangan Sumber Energi untuk Penanggulangan Stunting
Dukungan Hilirasi Pangan

- 1) Fasilitas Infrastruktur Pangan tingkat desa / kecamatan berdaya
- 2) Fasilitas UMKM Pangan Lokal tingkat desa / kecamatan berdaya
- 3) Fasilitas Kelembagaan Pangan tingkat desa / kecamatan berdaya
- 4) Dukungan Sertifikasi Pangan, Pangan Organik, Registrasi Pangan, Uji Mutu Pangan

2.2.3.3 Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 -2029

Tujuan Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dengan sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian dan Meningkatnya Produksi Perternakan. Hal ini dilakukan dengan strategi:

- 1) Pertanaman antar waktu antar wilayah (Indeks Pertanaman)
- 2) Pencegahan, pengendalian, dan pemantauan organisme pengganggu tanaman (OPT) serta DPI (Dampak Perubahan Iklim) yaitu melakukan mitigasi akibat bencana alam, banjir dan kekeringan.
- 3) Perlindungan lahan pertanian.
- 4) Melaksanakan Pengamanan Produksi dan Peningkatan Produktivitas
- 5) Perlindungan petani (asuransi, permodalan, jaminan harga dan pasar)
- 6) Penguatan kapasitas SDM pertanian (Petani, penyuluh, POPT,PBT) sbg ujung tombak produksi
- 7) Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal
- 8) Penyediaan benih yang berkualitas
- 9) Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan
- 10) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis

Berdasarkan analisis terhadap Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, terdapat faktor pendorong yang dapat meningkatkan pelayanan kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen berkaitan dengan

- a. Kesesuaian kawasan pengembangan komoditas tingkat provinsi dengan kabupaten
- b. Dukungan program kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi

Sedangkan faktor penghambat yang dapat menghambat kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

- a. Dinamika kebijakan Dinas ditingkat provinsi yang berdampak pada kurang optimalnya pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen

- b. Sistem pendataan dan ketersediaan data terdapat perbedaan antara pusat, provinsi, dan kabupaten.

2.2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

2.2.4.1 Analisis terhadap Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044 pasal 3 , tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah mewujudkan Kabupaten yang sejahtera, mandiri, berbasis Agrobisnis dan pariwisata yang berkelanjutan.

Dalam mendukung fokus pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen akan mengembangkan pusat pertumbuhan wilayah yang dituangkan dalam kebijakan penataan ruang wilayah yang termuat dalam RTRW Kabupaten Kebumen 2024-2044 (Perda Kabupaten Kebumen No 1 Tahun 2024). Penataan ruang wilayah Kabupaten Kebumen bertujuan mewujudkan Kabupaten yang sejahtera, mandiri, berbasis agrobisnis, dan pariwisata yang berkelanjutan. Penekanan pada kemandirian dan kesejahteraan tercermin dalam upaya peningkatan ekonomi lokal melalui hilirisasi sektor pertanian, penguatan kelembagaan petani, serta pengembangan kawasan produksi berbasis komoditas unggulan dapat dilihat pada Tabel 2.12

Tabel 2.12.
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
A.	Rencana kawasan pertanian			
1	Kawasan tanaman pangan seluas 44.113 Ha yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas 43.154 ha (97,83 persen)	Di 26 kecamatan di Kabupaten Kebumen	Perubahan Fungsi Lahan	Di 26 kecamatan di Kabupaten Kebumen.

Sumber Perda Kabupaten Kebumen No 1 Tahun 2024 (Data diolah)

Sejalan dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten mengacu pada kebijakan pengembangan kawasan pertanian dengan tetap menjaga sistem keseimbangan fungsi ruang dan keberlanjutan dengan perwujudan kawasan pertanian meliputi:

- a) Peningkatan Produktivitas Kawasan Tanaman Pangan
- b) Pengembangan Agrobisnis di Kawasan Tanaman Pangan
- c) Penetapan dan Perlindungan KP2B

- d) Pengkajian Alih Fungsi Lahan Pertanian
- e) Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Pertanian dan Agrobisnis
- f) Kajian Pembangunan dan Pengembangan Jalan Usaha Tani
- g) Intensifikasi dan Diversifikasi Pertanian untuk Mendukung Ketahanan Pangan
- h) Pengembangan dan Pemeliharaan Sumber Air untuk Pengairan Lahan

2.2.4.2 Analisis terhadap Dokumen KLHS

Isu strategis KLHS RPJMD Kabupaten Kebumen meliputi:

- a) Kualitas hidup sumber daya manusia yang masih rendah dan distribusi kesejahteraan sosial
- b) Masih rendahnya daya saing sektor ekonomi unggulan
- c) Ancaman degradasi hutan dan lahan
- d) Belum meratanya akses sanitasi, pelayanan sampah dan air bersih yang aman dan berkelanjutan
- e) Peningkatan ancaman intensitas multi bencana dan perubahan iklim
- f) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi

Berdasarkan KLHS RPJMD 2025–2029 bahwa rendahnya daya saing sektor ekonomi unggulan mengindikasikan pentingnya transformasi ekonomi lokal berbasis agribisnis dan inovasi dan kewirausahaan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah.

Berdasarkan analisis Rencana Tata Ruang Wilayah dan Dokumen KLHS Kabupaten Kebumen bahwa faktor yang mendukung dalam pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan sebagai berikut :

- a. Ketersediaan lahan yang dapat digunakan untuk lahan pertanian, peternakan, dan perkebunan.
- b. Pemetaan SDGs di Kabupaten Kebumen telah dilakukan sehingga terdapat dukungan perangkat daerah dalam mewujudkan SDGs.
- c. Permintaan bahan pangan yang sehat meningkat.
- d. klkjj

Sedangkan faktor yang menghambat diantaranya sebagai berikut:

- a. Keterbatasan sumber daya manusia yang akan mengelola lahan.
- b. Penggunaan pupuk yang tidak berimbang.
- c. Perubahan iklim.
- d. Terjadi alih lahan pertanian digunakan untuk lahan industri dan perumahan.

2.2.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, telaah Renstra Kementerian Pertanian 2025-2029, Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah 2025-2029, Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 2025-2029, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah 2025-2029, analisis RTRW dan KLHS, telaah yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kebumen

Berdasarkan identifikasi permasalahan pada pelayanan Distapang terdapat masalah yang berkaitan dengan belum optimalnya Penyediaan pangan masyarakat dan nilai tambah produk pertanian.

b. Renstra Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian mendukung dalam mencapai pertanian yang berkelanjutan, pengelolaan dengan teknologi terkini, dan memberikan manfaat bagi ketersediaan pangan serta kesejahteraan petani.

c. Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah memiliki tujuan Mewujudkan Ketahanan Pangan di Jawa Tengah dengan sasaran Meningkatnya Ketersediaan Pangan, Meningkatnya Keterjangkauan Pangan dan Meningkatnya Pemanfaatan Pangan. Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah memiliki tujuan meningkatkan PDRB Sektor Pertanian dan Sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian dan Peternakan dengan sasaran meningkatnya Produksi Pertanian dan meningkatnya Produksi Peternakan.

d. Implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis RTRW, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen berkaitan dengan kebijakan pengembangan kawasan yang dilakukan untuk mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan dan keamanan dan mendukung pengembangan agrobisnis. Selain itu dilakukan pemantapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk pelestarian kawasan pertanian dan pengembangan budidaya peternakan dalam sentra-sentra produksi peternakan.

Berdasarkan review tersebut maka ditentukan isu strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen yaitu Peningkatan Produksi Pertanian untuk mendukung Ketahanan Pangan yang berkelanjutan

Tabel 2.13
Isu Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Potensi Pertanian dengan kondisi tanah yang subur dan irigasi yang cukup menghasilkan komoditas Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan serta pengembangan agrowisata.	Belum optimalnya Penyediaan pangan masyarakat Belum optimalnya nilai tambah produk pertanian	Masih rendahnya daya saing sektor ekonomi unggulan	Dampak Perubahan Iklim Global	Rendahnya Produktivitas	Hilirisasi ekonomi berbasis komoditas unggulan Penerapan pembangunan ekonomi berkelanjutan	Peningkatan Produksi Pertanian untuk mendukung Ketahanan Pangan yang berkelanjutan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen yang bersesuaian dengan setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta indikator kinerja terkait pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, memiliki indikator dengan target capaian yang telah ditentukan, sebagai tolok ukur capaian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen selama 5 (lima) tahun ke depan. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, dapat dilihat pada Tabel 3.1. Pada Tabel tersebut, dapat diketahui bahwa Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen memiliki 1 (satu) tujuan jangka menengah, yaitu: Meningkatkan ketahanan pangan di seluruh daerah dan daya saing ekonomi sektor pertanian.

Upaya mencapai tujuan tersebut didukung melalui 3 (tiga) sasaran yaitu:

1. Meningkatnya penanganan kerawanan pangan
2. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan
3. Meningkatnya produksi sektor pertanian

Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen

No	NPSK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	BASELINE 2024	Target Kinerja Tujuan/Sasaran						Kondisi Akhir 2030
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan ketahanan pangan di seluruh daerah dan daya saing ekonomi sektor pertanian		Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	81,21	81,79	81,85	81,92	81,98	82,02	82,94	82,94
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	9,20	9,15	8,92	8,35	7,95	7,57	7,55	7,55
			Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	Skor PPH Konsumsi	Skor	93,05	93,10	93,35	93,65	93,95	94,25	94,55	94,55
2	Meningkatnya produktivitas sektor pertanian daerah	Meningkatkan ketahanan pangan di seluruh daerah dan daya saing ekonomi sektor pertanian		Nilai produksi pertanian	Rupiah	5.185.626.327.660	5.375.938.813.885	5.573.235.768.355	5.777.773.521.05	5.989.817.809.276	6.209.644.122.876	6.437.538.062.186	6.437.538.062.186
			Meningkatnya produksi sektor pertanian	Produksi Sektor Pertanian	Ton	629.835,33	636.133,68	642.495,02	648.919,97	655.409,17	661.963,26	668.582,89	668.582,89

Sumber: RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 – 2029

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah. Perencanaan yang baik disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat. Salah satu poin penting dalam aktivitas tersebut adalah upaya memperbaiki kinerja, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga pembangunan daerah yang merata ke seluruh masyarakat dapat terwujud.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dalam menciptakan nilai, di lain pihak, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati. Rumusan strategi dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Hasil rumusan strategi dan arah kebijakan berdasarkan masukan dari komponen masyarakat terkait disajikan pada Tabel 3.2. berikut ini

Tabel 3.2.
Arah Kebijakan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan perekonomian daerah yang memiliki produktivitas tinggi dan berbasis potensi lokal	Penguatan produksi dan hilirisasi melalui peningkatan nilai tambah berbasis potensi unggulan yang saling terintegrasi dan berdaya saing di pasar domestik maupun global	Peningkatan ketersediaan pangan, perbaikan akses masyarakat terhadap pangan Optimalisasi pemanfaatan pangan lokal, edukasi konsumsi pangan Beragam Bergizi seimbang dan aman optimalisasi lahan, pemanfaatan teknologi modern, penyediaan sarana prasarana pertanian, serta penerapan sistem budidaya berkelanjutan	

Tabel 3.3.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Kebumen Berdaya : Kebumen Beriman- Maju – Sejahtera - Berbudaya				
Misi: Misi 1 Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Berkeadilan dan Inklusif Misi 2 Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM yang Inovatif dan Berkelanjutan.				
Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan ketahanan pangan di seluruh daerah dan daya saing ekonomi sektor pertanian	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan pangan	Peningkatan ketersediaan pangan, perbaikan akses masyarakat terhadap pangan
		Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal	Optimalisasi pemanfaatan pangan lokal, edukasi konsumsi pangan Beragam Bergizi seimbang dan aman
Meningkatnya produktivitas sektor pertanian daerah	Meningkatkan ketahanan pangan di seluruh daerah dan daya saing ekonomi sektor pertanian	Meningkatnya produksi sektor pertanian	Meningkatkan Produksi Sektor Pertanian dalam arti luas	optimalisasi lahan, pemanfaatan teknologi modern, penyediaan sarana prasarana pertanian, serta penerapan sistem budidaya berkelanjutan

Sumber: Analisis Penyusun Tahun 2025

Strategi dan kebijakan yang dilakukan Dinas Pertanian dan Pangan pada tujuan Meningkatkan Meningkatkan ketahanan pangan di seluruh daerah dan daya saing ekonomi sektor pertanian dilakukan dengan Meningkatkan penanganan kerawanan pangan Meningkatkan kualitas konsumsi pangan Meningkatkan produksi sektor pertanian melalui strategi:

1. Peningkatan ketersediaan pangan bergizi, perbaikan akses masyarakat terhadap pangan sehat, serta penguatan edukasi gizi seimbang dan aman
2. Optimalisasi pemanfaatan pangan lokal, edukasi gizi seimbang, serta diversifikasi pangan dan peningkatan akses masyarakat terhadap pangan yang aman dan terjangkau
3. optimalisasi lahan, pemanfaatan teknologi modern, penyediaan sarana prasarana pertanian, serta penerapan sistem budidaya berkelanjutan

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana program Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen berisi program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan satuan kerja perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati serta program pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten. Perumusan rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan kerangka pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasar urusan pemerintahan daerah.

4.1 Rencana Program

Program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2025-2029 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
- c. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- d. Program Penanganan Kerawanan Pangan
- e. Program Pengawasan Keamanan Pangan
- f. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- g. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- h. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- i. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- j. Program Perizinan Usaha Pertanian

k. Program Penyuluhan Pertanian

4.2 Rencana Kegiatan

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2025-2029 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
10. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
11. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
12. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
13. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
14. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
15. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
16. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
17. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
18. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
19. Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer
20. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
21. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
22. Pengembangan Prasarana Pertanian
23. Pembangunan Prasarana Pertanian
24. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
25. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
26. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
27. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota

28. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
29. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
30. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
31. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
32. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

4.3 Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Secara lengkap, daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator kinerja dan kerangka pendanaan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen 2025-2029 dituangkan berdasarkan Tujuan dan sasaran serta indikator kinerja daerah disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen beserta Rencana Pendanaannya Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				25.393.733.015		26.616.746.330		27.680.283.145		29.097.015.374		30.157.683.131		
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				24.225.233.015		25.108.246.330		26.171.783.145		27.588.515.374		28.649.183.131		
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	77,6	77,69	24.225.233.015	77,77	25.108.246.330	77,85	26.171.783.145	77,93	27.588.515.374	78	28.649.183.131	2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	89,61	90,5		90,55		90,6		90,65		90,7			
2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				107.943.000		107.943.000		107.943.000		107.943.000		107.943.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	9	22	107.943.000	22	107.943.000	22	107.943.000	22	107.943.000	22	107.943.000		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	25	18		18		18		18		18			
2.09.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				53.764.000		53.764.000		53.764.000		53.764.000		53.764.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	9	22	53.764.000	22	53.764.000	22	53.764.000	22	53.764.000	22	53.764.000		
2.09.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				54.179.000		54.179.000		54.179.000		54.179.000		54.179.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	25	18	54.179.000	18	54.179.000	18	54.179.000	18	54.179.000	18	54.179.000		
2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				20.434.785.015		21.117.796.866		22.381.335.145		23.798.067.374		24.858.735.131		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	38	14	20.434.785.015	14	21.117.796.866	14	22.381.335.145	14	23.798.067.374	14	24.858.735.131		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	178	211		211		211		211		211			
2.09.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				20.393.997.015		21.077.008.866		22.340.547.145		23.757.279.374		24.817.947.131		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	178	211	20.393.997.015	211	21.077.008.866	211	22.340.547.145	211	23.757.279.374	211	24.817.947.131		
2.09.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				40.788.000		40.788.000		40.788.000		40.788.000		40.788.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	38	14	40.788.000	14	40.788.000	14	40.788.000	14	40.788.000	14	40.788.000		
2.09.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				4.438.000		4.438.000		4.438.000		4.438.000		4.438.000		
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3	4	4.438.000	4	4.438.000	4	4.438.000	4	4.438.000	4	4.438.000		
2.09.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4.438.000		4.438.000		4.438.000		4.438.000		4.438.000		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3	4	4.438.000	4	4.438.000	4	4.438.000	4	4.438.000	4	4.438.000		
2.09.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	290	50.000.000	290	50.000.000	290	50.000.000	290	50.000.000	290	50.000.000		
2.09.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	290	50.000.000	290	50.000.000	290	50.000.000	290	50.000.000	290	50.000.000		
2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				208.092.000		208.092.000		208.092.000		208.092.000		208.092.000		
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	208.092.000	12	208.092.000	12	208.092.000	12	208.092.000	12	208.092.000		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
2.09.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.473.000		4.473.000		4.473.000		4.473.000		4.473.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	4	4.473.000	4	4.473.000	4	4.473.000	4	4.473.000	4	4.473.000		
2.09.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000		
2.09.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				74.894.000		74.894.000		74.894.000		74.894.000		74.894.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	74.894.000	12	74.894.000	12	74.894.000	12	74.894.000	12	74.894.000		
2.09.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.682.000		6.682.000		6.682.000		6.682.000		6.682.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	6.682.000	4	6.682.000	4	6.682.000	4	6.682.000	4	6.682.000		
2.09.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				4.290.000		4.290.000		4.290.000		4.290.000		4.290.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	4.290.000	12	4.290.000	12	4.290.000	12	4.290.000	12	4.290.000		
2.09.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				47.148.000		47.148.000		47.148.000		47.148.000		47.148.000		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	4	4	47.148.000	4	47.148.000	4	47.148.000	4	47.148.000	4	47.148.000		
2.09.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000		
2.09.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.605.000		5.605.000		5.605.000		5.605.000		5.605.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4	4	5.605.000	4	5.605.000	4	5.605.000	4	5.605.000	4	5.605.000		
2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				212.210.000		412.211.464		212.210.000		212.210.000		212.210.000		
Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	17	212.210.000	17	412.211.464	17	212.210.000	17	212.210.000	17	212.210.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	12	20		20		20		20		20			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	42	22		22		22		22		22			
2.09.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				27.650.000		27.650.000		27.650.000		27.650.000		27.650.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	42	22	27.650.000	22	27.650.000	22	27.650.000	22	27.650.000	22	27.650.000		
2.09.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				84.560.000		84.560.000		84.560.000		84.560.000		84.560.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	17	84.560.000	17	84.560.000	17	84.560.000	17	84.560.000	17	84.560.000		
2.09.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		300.001.464		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	12	20	100.000.000	20	300.001.464	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000		
2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.912.971.000		2.912.971.000		2.912.971.000		2.912.971.000		2.912.971.000		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4	2.912.971.000	4	2.912.971.000	4	2.912.971.000	4	2.912.971.000	4	2.912.971.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.09.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.496.000		2.496.000		2.496.000		2.496.000		2.496.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4	2.496.000	4	2.496.000	4	2.496.000	4	2.496.000	4	2.496.000		
2.09.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				336.262.000		336.262.000		336.262.000		336.262.000		336.262.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12	12	336.262.000	12	336.262.000	12	336.262.000	12	336.262.000	12	336.262.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)													
2.09.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.574.213.000		2.574.213.000		2.574.213.000		2.574.213.000		2.574.213.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.574.213.000	12	2.574.213.000	12	2.574.213.000	12	2.574.213.000	12	2.574.213.000		
2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				294.794.000		294.794.000		294.794.000		294.794.000		294.794.000		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	16	4	294.794.000	4	294.794.000	4	294.794.000	4	294.794.000	4	294.794.000		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	9	7		7		7		7		7			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9	9		9		9		9		9			
2.09.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				67.244.000		67.244.000		67.244.000		67.244.000		67.244.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9	9	67.244.000	9	67.244.000	9	67.244.000	9	67.244.000	9	67.244.000		
2.09.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				11.550.000		11.550.000		11.550.000		11.550.000		11.550.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	16	4	11.550.000	4	11.550.000	4	11.550.000	4	11.550.000	4	11.550.000		
2.09.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				216.000.000		216.000.000		216.000.000		216.000.000		216.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9	7	216.000.000	7	216.000.000	7	216.000.000	7	216.000.000	7	216.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	(Unit)													
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				440.000.000		840.000.000		840.000.000		840.000.000		840.000.000		
Meningkatnya Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang dikelola dengan baik	Persentase Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang terkelola dengan baik (%)	89,5	89,76	440.000.000	90,29	840.000.000	90,81	840.000.000	91,34	840.000.000	91,86	840.000.000	2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				440.000.000		840.000.000		840.000.000		840.000.000		840.000.000		
Tersedianya Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang dikelola dengan baik	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	0	2	440.000.000	4	840.000.000	4	840.000.000	4	840.000.000	4	840.000.000		
2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya				440.000.000		840.000.000		840.000.000		840.000.000		840.000.000		
Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	0	2	440.000.000	4	840.000.000	4	840.000.000	4	840.000.000	4	840.000.000		
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				472.000.000		472.000.000		472.000.000		472.000.000		472.000.000		
Meningkatnya Angka Kecukupan Energi	Angka Kecukupan Energi (Kkal/Kapita/Hari)	3.645,56	3.655,56	472.000.000	3.660,56	472.000.000	3.665,56	472.000.000	3.670,56	472.000.000	3.675,56	472.000.000	2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				71.000.000		71.000.000		71.000.000		71.000.000		71.000.000		
Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	4	4	71.000.000	4	71.000.000	4	71.000.000		71.000.000	4	71.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	27	27		27		27		27		27			
2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				46.000.000		46.000.000		46.000.000		46.000.000		46.000.000		
Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	27	27	46.000.000	27	46.000.000	27	46.000.000	27	46.000.000	27	46.000.000		
2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	4	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000		25.000.000	4	25.000.000		
2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				325.000.000		325.000.000		325.000.000		325.000.000		325.000.000		
Terlaksananya pengelolaan cadangan pangan pemerintah	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara (Ton)	44,76	20	325.000.000	20	325.000.000	20	325.000.000	20	325.000.000	20	325.000.000		
2.09.03.2.02.0006 - Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota				325.000.000		325.000.000		325.000.000		325.000.000		325.000.000		
Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara (Ton)	44,76	20	325.000.000	20	325.000.000	20	325.000.000	20	325.000.000	20	325.000.000		
2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				76.000.000		76.000.000		76.000.000		76.000.000		76.000.000		
Terlaksananya Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	1	4	76.000.000	4	76.000.000	4	76.000.000	4	76.000.000	4	76.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				76.000.000		76.000.000		76.000.000		76.000.000		76.000.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	1	4	76.000.000	4	76.000.000	4	76.000.000	4	76.000.000	4	76.000.000		
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				216.500.000		96.500.000		96.500.000		96.500.000		96.500.000		
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan (%)	30,43	54,35	216.500.000	63,04	96.500.000	71,74	96.500.000	80,43	96.500.000	89,13	96.500.000	2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan				12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		
Tersusunnya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kecamatan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	1	4	12.500.000	4	12.500.000	4	12.500.000	4	12.500.000	4	12.500.000		
2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan				12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		
Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	1	4	12.500.000	4	12.500.000	4	12.500.000	4	12.500.000	4	12.500.000		
2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				204.000.000		84.000.000		84.000.000		84.000.000		84.000.000		
Tertanganinya Desa Rawan Pangan	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	4	204.000.000	4	84.000.000	4	84.000.000	4	84.000.000	4	84.000.000		
2.09.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				204.000.000		84.000.000		84.000.000		84.000.000		84.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	4	204.000.000	4	84.000.000	4	84.000.000	4	84.000.000	4	84.000.000		
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				40.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar	Persentase pangan segar aman (%)	92,75	93,53	40.000.000	94,12	100.000.000	94,71	100.000.000	95,29	100.000.000	95,88	100.000.000	2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				40.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya pengawasan keamanan dan mutu pangan segar	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Laporan)	1	4	40.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000		
2.09.05.2.01.0008 - Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				40.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Laporan)	1	4	40.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000		
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				26.033.596.868		24.129.285.855		34.832.397.468		35.165.208.074		26.493.767.037		
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				5.457.436.207		3.012.852.000		7.114.052.326		7.446.862.933		3.988.921.256		
Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (%)	9,58	9,31	5.457.436.207	9,37	3.012.852.000	9,52	7.114.052.326	9,55	7.446.862.933	9,61	3.988.921.256	2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				801.787.207		407.203.000		1.767.203.000		1.767.203.000		407.203.000		
Meningkatnya Penyediaan Sarana Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	2	2	801.787.207	2	407.203.000	2	1.767.203.000	2	1.767.203.000	2	407.203.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				759.656.207		331.623.000		1.691.623.000		1.691.623.000		331.623.000		
Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	1	1	759.656.207	1	331.623.000	1	1.691.623.000	1	1.691.623.000	1	331.623.000		
3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				42.131.000		75.580.000		75.580.000		75.580.000		75.580.000		
Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	2	2	42.131.000	2	75.580.000	2	75.580.000	2	75.580.000	2	75.580.000		
3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				396.696.000		486.696.000		1.986.696.000		2.086.696.000		608.754.323		
Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3	3	396.696.000	3	486.696.000	3	1.986.696.000	3	2.086.696.000	3	608.754.323		
	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	2	3		3		3		3		3			
3.27.02.2.02.0002 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				260.809.000		250.809.000		1.250.809.000		1.250.809.000		272.867.323		
Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3	3	260.809.000	3	250.809.000	3	1.250.809.000	3	1.250.809.000	3	272.867.323		
3.27.02.2.02.0003 - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				100.859.000		100.859.000		100.859.000		100.859.000		100.859.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	2	3	100.859.000	3	100.859.000	3	100.859.000	3	100.859.000	3	100.859.000		
3.27.02.2.02.0004 - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman				35.028.000		135.028.000		635.028.000		735.028.000		235.028.000		
Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	1	1	35.028.000	1	135.028.000	1	635.028.000	1	735.028.000	1	235.028.000		
3.27.02.2.03 - Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota				19.000.000		39.000.000		39.000.000		39.000.000		39.000.000		
Terfasilitasinya KTT yang menerapkan pemberian pakan/HPT unggul	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	1	1	19.000.000	1	39.000.000	1	39.000.000	1	39.000.000	1	39.000.000		
3.27.02.2.03.0001 - Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				19.000.000		39.000.000		39.000.000		39.000.000		39.000.000		
Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	1	1	19.000.000	1	39.000.000	1	39.000.000	1	39.000.000	1	39.000.000		
3.27.02.2.04 - Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer				10.953.000		10.953.000		10.953.000		10.953.000		10.953.000		
Terawasinya pengecer obat hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)	1	1	10.953.000	1	10.953.000	1	10.953.000	1	10.953.000	1	10.953.000		
3.27.02.2.04.0001 - Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan				10.953.000		10.953.000		10.953.000		10.953.000		10.953.000		
Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)	1	1	10.953.000	1	10.953.000	1	10.953.000	1	10.953.000	1	10.953.000		
3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota				950.000.000		1.190.000.000		1.190.000.000		1.190.000.000		1.190.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya peredaran benih/bibit ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (Laporan)	1	1	950.000.000	1	1.190.000.000	1	1.190.000.000	1	1.190.000.000	1	1.190.000.000		
3.27.02.2.05.0008 - Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak				950.000.000		1.190.000.000		1.190.000.000		1.190.000.000		1.190.000.000		
Terjaminnya peredaran benih/bibit ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (Laporan)	1	1	950.000.000	1	1.190.000.000	1	1.190.000.000	1	1.190.000.000	1	1.190.000.000		
3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain				3.279.000.000		879.000.000		2.120.200.326		2.353.010.933		1.733.010.933		
Terfasilitasinya Kelompok Tani ternak yang mendapatkan Bantuan Bibit ternak	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	585	596	3.279.000.000	108	879.000.000	113	2.120.200.326	124	2.353.010.933	124	1.733.010.933		
3.27.02.2.06.0003 - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				3.279.000.000		879.000.000		2.120.200.326		2.353.010.933		1.733.010.933		
Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	585	596	3.279.000.000	108	879.000.000	113	2.120.200.326	124	2.353.010.933	124	1.733.010.933		
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				18.533.585.400		18.816.689.855		25.317.351.142		25.317.351.141		20.003.851.781		
Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase ketersediaan Prasarana Pertanian dalam kondisi baik (%)	28,94	29,16	18.533.585.400	29,21	18.816.689.855	29,27	25.317.351.142	29,33	25.317.351.141	29,39	20.003.851.781	2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian				2.959.932.600		3.059.932.600		3.108.796.600		3.108.796.600		3.108.796.600		
Meningkatnya Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	0	0	2.959.932.600	1	3.059.932.600	1	3.108.796.600	1	3.108.796.600	1	3.108.796.600		
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	2	1		1		1		1		1			
	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				2.943.267.600		2.943.267.600		2.943.267.600		2.943.267.600		2.943.267.600		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	2	1	2.943.267.600	1	2.943.267.600	1	2.943.267.600	1	2.943.267.600	1	2.943.267.600		
3.27.03.2.01.0015 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota				16.665.000		66.665.000		115.529.000		115.529.000		115.529.000		
Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	1	1	16.665.000	1	66.665.000	1	115.529.000	1	115.529.000	1	115.529.000		
3.27.03.2.01.0017 - Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian				0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian				15.523.652.800		15.606.757.255		21.808.554.542		21.808.554.541		16.495.055.181		
Tersedianya Prasarana Pertanian	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	12	5	15.523.652.800	4	15.606.757.255	4	21.808.554.542	4	21.808.554.541	4	16.495.055.181		
	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	25	5		6		6		6		6			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	2		3		3		3		3			
	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	22	2		2		2		2		2			
3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani				1.200.000.000		1.200.000.000		3.200.000.000		3.200.000.000		1.200.000.000		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	25	5	1.200.000.000	6	1.200.000.000	6	3.200.000.000	6	3.200.000.000	6	1.200.000.000		
3.27.03.2.02.0008 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya				672.597.000		922.597.000		797.597.000		797.597.000		1.484.097.639		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	2	672.597.000	3	922.597.000	3	797.597.000	3	797.597.000	3	1.484.097.639		
3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya				11.050.000.000		11.350.000.000		13.676.797.287		13.676.797.286		11.676.797.287		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	22	2	11.050.000.000	2	11.350.000.000	2	13.676.797.287	2	13.676.797.286	2	11.676.797.287		
3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani				1.270.000.000		803.104.455		2.803.104.455		2.803.104.455		803.104.455		
terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	12	5	1.270.000.000	4	803.104.455	4	2.803.104.455	4	2.803.104.455	4	803.104.455		
3.27.03.2.02.0014 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
3.27.03.2.02.0015 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan				1.131.055.800		1.131.055.800		1.131.055.800		1.131.055.800		1.131.055.800		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	2	2	1.131.055.800	2	1.131.055.800	2	1.131.055.800	2	1.131.055.800	2	1.131.055.800		
3.27.03.2.03 - Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota				50.000.000		150.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
Terfasilitasinya Wilayah Sumber Bibit dalam rangka pelestarian	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan (Laporan)	1	1	50.000.000	1	150.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000		
3.27.03.2.03.0001 - Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak				50.000.000		150.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
Terlaksananya Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan (Laporan)	1	1	50.000.000	1	150.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000		
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				515.937.000		714.801.000		714.801.000		714.801.000		714.801.000		
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase penyakit hewan yang tertangani (%)	100	100	515.937.000	100	714.801.000	100	714.801.000	100	714.801.000	100	714.801.000	2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terjaminnya Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
3.27.04.2.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota				129.000.000		229.000.000		229.000.000		229.000.000		229.000.000		
Terawasinya Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (laporan)	1	1	129.000.000	1	229.000.000	1	229.000.000	1	229.000.000	1	229.000.000		
	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
3.27.04.2.02.0004 - Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)				65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		
Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (laporan)	1	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000		
3.27.04.2.02.0007 - Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya				64.000.000		164.000.000		164.000.000		164.000.000		164.000.000		
Terkendalinya Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (Laporan)	1	1	64.000.000	1	164.000.000	1	164.000.000	1	164.000.000	1	164.000.000		
3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota				270.000.000		270.000.000		270.000.000		270.000.000		270.000.000		
Terkelolanya Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	1	1	270.000.000	1	270.000.000	1	270.000.000	1	270.000.000	1	270.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Kabupaten/Kota														
3.27.04.2.03.0002 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner				270.000.000		270.000.000		270.000.000		270.000.000		270.000.000		
Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	1	1	270.000.000	1	270.000.000	1	270.000.000	1	270.000.000	1	270.000.000		
3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				16.937.000		115.801.000		115.801.000		115.801.000		115.801.000		
Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	1	1	16.937.000	1	115.801.000	1	115.801.000	1	115.801.000	1	115.801.000		
3.27.04.2.04.0002 - Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				16.937.000		115.801.000		115.801.000		115.801.000		115.801.000		
Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	1	1	16.937.000	1	115.801.000	1	115.801.000	1	115.801.000	1	115.801.000		
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				345.406.519		371.406.000		472.656.000		472.656.000		572.656.000		
Meningkatnya pengendalian dan penanganan bencana pertanian	Persentase Peningkatan pengendalian dan penanganan bencana pertanian (%)	1,38	1,51	345.406.519	1,53	371.406.000	1,68	472.656.000	1,71	472.656.000	1,73	572.656.000	2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				345.406.519		371.406.000		472.656.000		472.656.000		572.656.000		
Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	0	50	345.406.519	50	371.406.000	100	472.656.000	100	472.656.000	100	572.656.000		
	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	555	555		565		575		585		595			
	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	2	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				263.087.519		289.087.000		339.087.000		339.087.000		439.087.000		
Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	555	555	263.087.519	565	289.087.000	575	339.087.000	585	339.087.000	595	439.087.000		
3.27.05.2.01.0002 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				48.750.000		48.750.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	0	50	48.750.000	50	48.750.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000		
3.27.05.2.01.0006 - Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan				33.569.000		33.569.000		33.569.000		33.569.000		33.569.000		
Tertanggulangnya pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	2	2	33.569.000	2	33.569.000	2	33.569.000	2	33.569.000	2	33.569.000		
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				29.180.000		29.180.000		29.180.000		29.180.000		29.180.000		
Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Pertanian dan Peternakan	Persentase izin usaha Pertanian dan Peternakan (%)	100	100	29.180.000	100	29.180.000	100	29.180.000	100	29.180.000	100	29.180.000	2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3.27.06.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				14.599.000		14.599.000		14.599.000		14.599.000		14.599.000		
Terfasilitasinya izin usaha pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	1	4	14.599.000	4	14.599.000	4	14.599.000	4	14.599.000	4	14.599.000		
3.27.06.2.01.0002 - Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				14.599.000		14.599.000		14.599.000		14.599.000		14.599.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	1	4	14.599.000	4	14.599.000	4	14.599.000	4	14.599.000	4	14.599.000		
3.27.06.2.02 - Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan				14.581.000		14.581.000		14.581.000		14.581.000		14.581.000		
Terfasilitasinya izin usaha peternakan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan (Dokumen)	1	4	14.581.000	4	14.581.000	4	14.581.000	4	14.581.000	4	14.581.000		
3.27.06.2.02.0001 - Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan				14.581.000		14.581.000		14.581.000		14.581.000		14.581.000		
Terlaksananya Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan (Dokumen)	1	4	14.581.000	4	14.581.000	4	14.581.000	4	14.581.000	4	14.581.000		
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				1.152.051.742		1.184.357.000		1.184.357.000		1.184.357.000		1.184.357.000		
Meningkatnya Kinerja Penyuluhan Pertanian	Persentase skor Evaluasi Kinerja Penyuluhan Pertanian (%)	72,5	75	1.152.051.742	77,5	1.184.357.000	80	1.184.357.000	82,5	1.184.357.000	85	1.184.357.000	2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				1.152.051.742		1.184.357.000		1.184.357.000		1.184.357.000		1.184.357.000		
Meningkatnya Kinerja Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	34	34	1.152.051.742	35	1.184.357.000	36	1.184.357.000	37	1.184.357.000	38	1.184.357.000		
	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	50	30		30		30		30		30			
	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	0	128		128		128		128		128			
	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	2	2		2		2		2		2			
3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa				327.694.000		360.000.000		360.000.000		360.000.000		360.000.000		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	34	34	327.694.000	35	360.000.000	36	360.000.000	37	360.000.000	38	360.000.000		
3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa				127.453.742		127.453.000		127.453.000		127.453.000		127.453.000		
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	50	30	127.453.742	30	127.453.000	30	127.453.000	30	127.453.000	30	127.453.000		
3.27.07.2.01.0005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota				65.941.000		65.941.000		65.941.000		65.941.000		65.941.000		
Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	2	2	65.941.000	2	65.941.000	2	65.941.000	2	65.941.000	2	65.941.000		
3.27.07.2.01.0006 - Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian				603.680.000		603.680.000		603.680.000		603.680.000		603.680.000		
Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	0	128	603.680.000	128	603.680.000	128	603.680.000	128	603.680.000	128	603.680.000		
3.27.07.2.01.0008 - Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani				27.283.000		27.283.000		27.283.000		27.283.000		27.283.000		
Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	1	1	27.283.000	1	27.283.000	1	27.283.000	1	27.283.000	1	27.283.000		

4.4 Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Indikator kinerja mendefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur output atau outcome. Indikator kinerja merupakan alat ukur untuk dapat menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan. Indikator kinerja akan memberikan tanda program atau kegiatan mana yang telah tercapai dan program/kegiatan yang belum tercapai. Dengan adanya tanda ini akan memudahkan untuk melakukan tindakan berikutnya sehingga kinerja yang ditetapkan dapat semua tercapai sesuai dengan target. Indikator kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen 2025-2029 setiap tahunnya ditetapkan berdasarkan target yang akan dicapai, dengan melihat potensi dan kekurangan dari lembaga.

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dalam menjalankan program dan kegiatan untuk pelayanan kepada masyarakat berdasar tugas dan fungsinya adalah dalam rangka pencapaian Visi Misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Indikator Program yang tertuang dalam Renstra ini disamping untuk mendukung pencapaian visi misi tersebut juga untuk pemenuhan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintah daerah.

Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Beberapa indikator kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tersebut secara lengkap dituangkan dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Capaian 2024	Perkiraan Capaian 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Indikator Tujuan									
a.	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	81,21	81,79	81,85	81,92	81,98	82,02	82,94	82,94
b.	Nilai produksi pertanian	Rupiah	5.185.626.327.660	5.375.938.813.885	5.573.235.768.355	5.777.773.521.05	5.989.817.809.276	6.209.644.122.876	6.437.538.062.186	6.437.538.062.186
2.	Indikator Sasaran Urusan Pangan									
a.	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	9,20	9,15	8,92	8,35	7,95	7,57	7,55	7,55
b.	Skor PPH Konsumsi	Skor	93,05	93,10	93,35	93,65	93,95	94,25	94,55	94,55
3.	Indikator Sasaran Urusan Pertanian									
a.	Produksi Sektor Pertanian	Ton	629.835,33	636.133,68	642.495,02	648.919,97	655.409,17	661.963,26	668.582,89	668.582,89

Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen ditetapkan berdasarkan tujuan dan sasaran pada RPJMD Kabupaten Kebumen yang sesuai dan sinkron dengan urusan yang diampu oleh Dinas Pertanian dan Pangan yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Pangan. Dalam 5 (lima) tahun ke depan, indikator kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pangan yaitu Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) dan Skor PPH Konsumsi. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan dengan target pada tahun 2025 sebesar 9,15%, tahun 2026 sebesar 8,92%, tahun 2027 sebesar 8,35%, tahun 2028 sebesar 7,95%, tahun 2029 sebesar 7,55 % dan tahun 2030 diharapkan tercapai 7,55%.

Semakin rendah PoU mengidentifikasikan semakin sedikit penduduk yang mengonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya. PoU Kabupaten Kebumen cenderung pada tahun 2024 sudah pada angka 9,20 persen. Hal ini menunjukkan walaupun terus menurun, masih terdapat 9,20 persen dari total penduduk di Kabupaten Kebumen yang mengalami masalah pemenuhan gizi sehingga membutuhkan perhatian khusus untuk meningkatkan akses pangan dan gizi, seperti melalui bantuan pangan, subsidi atau peningkatan produksi pangan lokal. Dampak kekurangan gizi seperti ini juga dapat menurunkan produktivitas, menghambat pembangunan ekonomi dan sosial seperti tingginya beban kesehatan masyarakat.

Sedangkan Skor PPH Konsumsi dengan target tahun 2025 sebesar 93,10, tahun 2026 sebesar 93,35, tahun 2027 sebesar 93,65, tahun 2028 sebesar 93,65, tahun 2029 sebesar 94,25 dan tahun 2030 diharapkan mencapai target sebesar 94,55. Skor PPH yang semakin tinggi menunjukkan pola makan yang lebih beragam dan seimbang, sejalan dengan Kriteria Pola Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).

Indikator kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian yaitu Produksi Sektor Pertanian, dengan target pada tahun dengan target pada tahun 2025 sebesar 636.133,68 ton, tahun 2026 sebesar 642.495,02 ton, tahun 2027 sebesar 648.919,97 ton, tahun 2028 sebesar 655.409,17 ton, tahun 2029 sebesar 661.963,26 ton dan tahun 2030 diharapkan tercapai 668.582,89 ton.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjadi salah satu pedoman yang digunakan dalam menetapkan indikator kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen. Rumus Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran yang tercantum pada Permendagri 86 Tahun 2017 yang sesuai dengan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Pangan dapat dilihat pada Tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4.3. Rumus Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Urusan

No	Indikator	Rumus
1.	Indikator Tujuan	
a.	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	1. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan z-score dan distance to scale (0-100); 2. Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator; 3. Mengelompokkan wilayah ke dalam 6 kelompok berdasarkan cut off point IKP Dihitung oleh BAPANAS
b.	Nilai produksi pertanian	Jumlah produksi sektor pertanian di

No	Indikator	Rumus
1.	Indikator Tujuan	
		kali harga dalam satuan rupiah Sumber Data : DISTAPANG
2.	Indikator Urusan Pangan	
a.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Membandingkan antara konsumsi kalori per kapita dan MDER. Nilai PoU merupakan proporsi penduduk yang konsumsi kalornya di bawah MDER terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan $PoU = \int_{MDER}^{\infty} f(x) dx$ Keterangan: PoU : Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal. MDER: Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan ideal (Minimum Dietary Energy Requirement). f(x) : Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu Sumber Data : BAPANAS, BPS
b.	Skor PPH Konsumsi	% Angka Kecukupan Energi (AKE) x bobot masing-masing kelompok pangan Sumber Data : BAPANAS
3.	Indikator Urusan Pertanian	
a.	Produksi Sektor Pertanian	Jumlah produksi komoditas pertanian (komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) dalam satuan ton. Sumber Data : DISTAPANG

Tabel 4.4. Target Indikator Kinerja Kunci Urusan Pangan dan Pertanian Tahun 2025-2029

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PANGAN								
1	Persentase Pengelolaan Cadangan Pangan	%	11,63	17,89	17,89	17,89	17,89	17,89	
2	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota	Nilai	93,1	93,35	93,65	93,95	94,25	94,55	
3	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	45,65	54,35	63,04	71,74	80,43	89,13	
4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	92,94	93,53	94,12	94,71	95,29	95,88	
	URUSAN PERTANIAN								
1	Peningkatan produksi tanaman pangan	%	12,46	12,8	13,17	13,57	13,99	14,45	
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	9,45	9,71	9,99	10,29	10,62	10,96	
3	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	%	9,6	9,87	10,15	10,46	10,79	11,13	
4	Peningkatan Produksi komoditas Perkebunan	%	6,66	6,85	7,04	7,26	7,48	7,72	
5	Luas areal pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Ha	555	605	615	675	685	695	
6	Persentase penyakit hewan yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	

BAB V PENUTUP

5.1 Hasil Review Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Berdasarkan hasil review yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) disimpulkan bahwa penyusunan dan perumusan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 masih dijumpai beberapa kelemahan yang harus disempurnakan lebih lanjut dengan melakukan perbaikan antara lain :

1. Menyusun kembali perumusan latar belakang yang dilengkapi dengan nilai strategis Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025-2029 sesuai dengan Inmendagri No. 2 Tahun 2025.
2. Menyusun kembali perumusan isu strategis terkait isu lingkungan dinamis yang relevan dengan perangkat daerah (global, nasional dan regional) yang mengacu pada Inmendagri No. 2 Tahun 2025.
3. Menyusun kembali perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan perumusan arah kebijakan berupa operasionalisasi NSPK mengacu pada Inmendagri No. 2 Tahun 2025.
4. Mencantumkan target Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025-2029 mengacu pada Inmendagri No. 2 Tahun 2025.

Seluruh rekomendasi dan hasil review yang disampaikan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) telah ditindaklanjuti oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen. Tindak lanjut tersebut dilakukan dengan melakukan perbaikan pada dokumen Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025-2029.

5.2 Sinkronisasi Renstra Dinas Pertanian dan Pangan

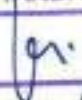
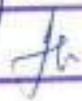
Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 telah selaras dan sinkron dengan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 mendukung visi pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dengan misi Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Berkeadilan dan Inklusif dan Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM yang Inovatif dan Berkelanjutan. Mendukung Meningkatkan Layanan Dasar yang inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global dan Meningkatkan Pertumbuhan perekonomian perkotaan dan pedesaan berbasis sektor unggulan yang inovatif, mandiri, dan berkelanjutan.

Hal ini juga selaras dengan Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah Meneguhkan posisi Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia yaitu

memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN


TEGUH YULIONO, S.T., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19780731 200501 1 006

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPERIDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Katman Karmila	
Budi Jalmu	

LAMPIRAN

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
FORUM PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025**

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
FORUM PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN 2025**

1. Pendahuluan

Forum Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah untuk merumuskan program, kegiatan dan subkegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 maupun Renja Perangkat Daerah Tahun 2026. Forum Perangkat Daerah bertujuan untuk :

- a. Memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renstra maupun Renja Perangkat Daerah;
- b. Menyelaraskan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
- c. Mempertajam indikator serta target program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- d. Menyelaraskan program, kegiatan dan subkegiatan antara Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan
- e. Menyesuaikan pendanaan program, kegiatan dan subkegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah dan prioritas pembangunan daerah pada rancangan Renstra maupun Renja Perangkat Daerah serta berbagai regulasi yang terkait.

2. Dasar Pelaksanaan

- a. Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 000.7.2/789 Tahun 2025 Tanggal 13 Maret 2025 Tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Penyusunan rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 Serta Petunjuk Pelaksanaan Forum Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026
- b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2025, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

3. Waktu, Tempat, Narasumber, Peserta, dan Kepanitiaan

- a. Waktu : Selasa, 25 Maret 2025
- b. Tempat : Ruang Pertemuan Gringsing, Hotel Mexolie, Jl. Stasiun
No.8, Panjer, Kec. Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah

c. Narasumber

- 1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Kebumen
- 2) Ketua Komisi B DPRD kabupaten Kebumen;
- 3) Inspektur Kabupaten Kebumen;
- 4) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- 5) Kepala Badan Perencanaan, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 6) Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen;
- 7) Kepala Bidang pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen.

d. Peserta :

Peserta berjumlah 150 Orang yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan mengikut sertakan perwakilan unsur perempuan dan unsur anak, yaitu :

- 1) Delegasi kecamatan Se-Kabupaten Kebumen;
- 2) Camat Se-Kabupaten Kebumen;
- 3) Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kebumen
- 4) Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan Se-Kabupaten Kebumen;
- 5) Koordinator Puskesmas dan Koordinator POPT Kabupaten Kebumen;
- 6) Delegasi kelompok -kelompok masyarakat di tingkat kabupaten;
- 7) Instansi terkait;
- 8) Lembaga Swadaya Masyarakat;
- 9) Unsur pelaksana teknis Perangkat Daerah;
- 10) Ahli/ profesional dari kalangan praktisi maupun akademisi;
- 11) Unsur Anak.

e. Tim Penyelenggara

Forum Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 diselenggarakan oleh Tim Penyelenggara Forum Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan kabupaten Kebumen Tahun 2025 yang susunan dan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Nomor : 800/870 tanggal 25 Maret 2025. Adapun Tugas Tim Penyelenggara sebagai berikut:

- 1. Memfasilitasi penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah;

2. Menyusun hasil pemutakhiran rancangan Renstra maupun Renja Perangkat Daerah berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah;
3. Membuat berita acara penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah; dan
4. Melaporkan hasil pemutakhiran rancangan Renstra maupun Renja Perangkat Daerah kepada Bappeda.

4. Pembiayaan

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah ini dibiayai dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2025, yang dibebankan pada Kegiatan Perencanaan , Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah .

5. Susunan Acara

SUSUNAN ACARA FORUM PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

JAM	ACARA	PELAKSANA
08.00 – 08.30	Registrasi/ Pendaftaran Peserta	Panitia
08.30 – 09.00	Pra Acara	Panitia
09.00 – 09.10	Pembukaan	MC
09.10 – 09.20	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars Kebumen	Panitia
09.20 – 09.25	Pembacaan Doa	Petugas
09.25 – 09.35	Laporan Penyelenggaraan	Sekretaris Dinas
09.35 – 12.00	Pleno Pelaksanaan Forum OPD	Moderator 1. Eko Widiyantoro, S.E., S.St., M.Si. 2. Fajar Rachmanto, S.T.
	1. Pembacaan dan Penyepakatan Tata Tertib	Moderator 1. Eko Widiyantoro, S.E., S.St., M.Si. 2. Fajar Rachmanto, S.T.
	2. Paparan Kebijakan Pemerintah Daerah terkait Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Kebumen
	3. Pemaparan tentang pokok-pokok materi rancangan awal RPJMD	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	4. Pemaparan kebijakan Pemerintah Daerah terkait dengan prioritas pembangunan daerah	
	5. Pemaparan pokok-pokok materi Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen
	6. Pemaparan Prioritas Pembangunan berdasar Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	

JAM	ACARA	PELAKSANA
	7. Pembahasan/Diskusi Tanya Jawab dan Kesepakatan	Moderator 1. Eko Widiyantoro, S.E., S.St., M.Si. 2. Fajar Rachmanto, S.T.
	a. Tanggapan/masukan dari Peserta	Peserta
	b. Tanggapan/masukan dari Narasumber	Narasumber
12.00 – 12.10	Pemilihan Delegasi	MC
12.10 – 12.20	Penandatanganan Berita Acara Forum PD Dinas Pertanian dan Pangan	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen
12.20 – 12.30	Penutupan	Panitia

6. Keluaran

Keluaran yang akan dihasilkan melalui pelaksanaan Rapat Forum Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen tahun 2025 adalah Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah dengan lampiran - lampiran sebagai berikut:

- Tabel Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- Tabel Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 hasil entri SIPD
- Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Tahun 2026 Sumber Dana APBD Provinsi (sektoral)
- Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Tahun 2026 Sumber Dana APBD Provinsi (bantuan keuangan)
- Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Tahun 2026 Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK)
- Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Tahun 2026 sumber dana APBN/Tugas Pembantuan (TP) atau sumber pendanaan lainnya
- Tabel Daftar Kegiatan Pembangunan Lintas Perangkat Daerah
- Daftar delegasi Musrenbang RKPD dan Daftar hadir peserta Forum Perangkat Daerah Tahun 2025.

6. Penutup

Demikian Laporan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen 2025 Tahun 2025, dengan harapan hasil dari kegiatan ini dapat bermanfaat untuk perencanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian Kabupaten kebumen yang lebih baik.

Kebumen, 25 Maret 2025

Pimpinan Sidang
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN


TEGUH YULIONO, S.T., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197807312005011006

**DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN
FORUM PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025**

**DOKUMEN PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025**

1. Pleno Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah



2. Pemaparan Materi Forum Perangkat Daerah



3. Pembahasan/Diskusi Tanya Jawab dan Kesepakatan Forum Perangkat Daerah



4. Penandatanganan Berita Acara Forum Perangkat Daerah



**BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025**

**HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEBUMEN**

Pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

- a. Pemaparan materi pada Forum Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen
- b. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh narasumber sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Forum Perangkat Daerah, maka pada:

Hari dan Tanggal	: Selasa, 25 Maret 2025
Jam	: 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Pertemuan Gringsing, Hotel Mexolie, Jl. Stasiun No.8, Panjer, Kec. Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah

Forum Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2025:

MENYEPAKATI

- KESATU** : Isu strategis (pelayanan) Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 – 2029 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEDUA** : Rencana program, kegiatan dan sub-kegiatan prioritas Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 – 2029 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KETIGA** : Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 – 2029 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.
- KEEMPAT** : Hasil kesepakatan forum Renstra Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 – 2029 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.
- KELIMA** : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 – 2029.

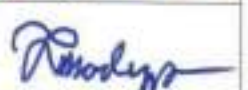
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 25 Maret 2025

Pimpinan Sidang
**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN**


TEGUH YULIONO, S.T., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197807312005011006

Mewakili Peserta Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen

No	Nama	Lembaga/ Instansi	Jabatan/ Alamat	Tanda Tangan
1.	SAIFUL ANWAR	DPRD	KETUA KOMISI B	
2.	Budi Satmiko	Unsur Perangkat Daerah	IFP. madya	
3.	Wikan Ti	Unsur Kecamatan	Camat	
4.	IMADE YODA PRABANDHA	Unsur Lembaga	DASEN	
5.	NANI SUMAREYATI	Unsur Masyarakat/ LSM	KETUA KTNA	

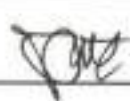
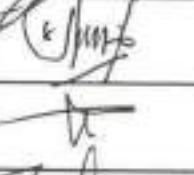
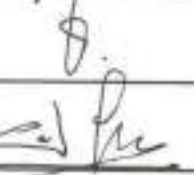
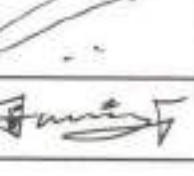
DELEGASI PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PADA
MUSRENBANG RPJMD KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

NO.	NAMA	INSTANSI	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	NANI SUMAREYATI	KTNA		

**DAFTAR HADIR PESERTA
FORUM PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025**

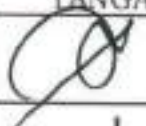
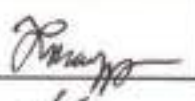
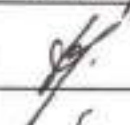
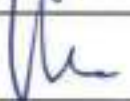
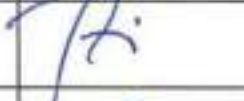
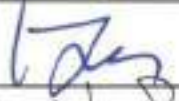
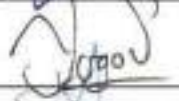
DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEBUMEN

KABUPATEN : KEBUMEN
TANGGAL : 25 MARET 2025
TEMPAT : Ruang Pertemuan Gringsing, Hotel Mexolie Jl. Stasiun No.8,
Panjer, Kec. Kebumen, Kabupaten Kebumen

No	NAMA	LEMBAGA/ INSTANSI	ALAMAT DAN NO TELEPON	TANDA TANGAN
1	Ratna	Kec. Sragi	089737625399	
2	Teguh Y	Kadinas	Ditapang	
3	Eko W	sekda	Ditapang	
4	Leh Sunandjoe	Pembesaran	081392551719	
5	Mulya	Kec. Adimulya	082139672953	
6	Supriyanto	ke. Gombang		
7	Kudat Jemilki	BPPK		
8	Vicdo Hartanto	BPHD		
9	Sujijah	Kec. Bonorowo	085292004178	
10	Mahmudi	Kec. Puring		
11	Teguh Priyono	POPT	085226232064	
12	Moch Nurudin	BPP Gombang	081912030330	
13	Wifor Gem	PPMPBP	081228112468	
14	KAHAD .S	BAFOROH		
15	Jarwan	Petani milenial	081804681930	
16	Darmo	KTT	085227369766	
17	Suparno	Dinas. PPKB	082134636732	
18	Tri Ari. J	Petani Milenial	082300068555	
19	Ashari	Ditapang		
20	Wisonggeni B.A.	UNIMUBO	0821-5730-5236	

No	NAMA	LEMBAGA/ INSTANSI	ALAMAT DAN NO TELEPON	TANDA TANGAN
21	Sugeng Haryadi	BPP Ayah	081327606440	Act.
22	Bombong Tri H	BPP Sempor	085726115108	
23	Ratna Tri K	BPP Pajagan	085227160848	
24	Akhmad Jazah	ASOSIASI PETAH KELENGKONG M	082879691260	
25	Addya Rahmat S	Forum Anak Kudu	085109210229	
26	Riky Suryaning T	Forum Anak	083822775089	Act
27	Don Y	Itida	082242458189	
28	Misno	Kec. Ayah	085776458744	
29	Ferry	Kec. Pakur	—	
30	Futrisno	BPP Rawadale	081391164611	
31	Anna Bertha	BPP Kudu	081329490549	
32	Amir M.	Kec. Rawadale	081726161231	
33	Liftyawati	Dinast	081328733315	
34	Nehy	DPUPR	085740007383	
35	Katankaro	BPP Alcar	082134327428	
36	Mal Mela	Ka Kudu	081326810921	
37	P. Doki	Bandung	082135586669	
38	Tamara S	Kec. Pajagan	085712163885	
39	Ahmad Megali	P. Ternggad	081391430027	
40	Musfah	BPP Murt	087837960747	
41	Asri W W	BPP Murt	082226844577	
42	FREDI	TPHP	08112950226	
43	Willem Trig	Kec. Pajagan	—	
44	Angi Chyza	Kec. Pakur	082326074180	

No	NAMA	LEMBAGA/ INSTANSI	ALAMAT DAN NO TELEPON	TANDA TANGAN
45	Faniarah	Kec. Kembangan	Kembangan	
46	Juni Miorisih	BPP Padurejo	Padurejo	
47	Subagyo	Kec. Sadang	Sadangkulon	
48	Tri H.	BPP Klerang	Klerang	
49	del. Widhy Hade	RPH Keben	Keben	
50	Petrus Hader	Distapang	Kel. mel	
51	Tibiyanti Anuli	BPP Karanganyar	Karanganyar	
52	Budiyo	Kec. Papanahon	Papanahon	
53	PONIGO	Kec. Muli	Muli	
54	Ri anto	Kec. Gombang	Wero	
55	Sejipul Isman	KTT Karanganyar	Buluspesantren	
56	Arjo. B. J.	Kec. Karanganyar	Karanganyar	
57	Amir	Purwokerto	Karanganyar	
58	Amir Purnomo	BPP Purbalingga	Purbalingga	
59	Elly Y	Bag. PRD	Setelan	
60	Yah. I. H.	Kec. Klaten	Klaten	
61	Wumpaningrum	THP	Distapang	
62	Hanny	BPP Buaru	Buaru	
63	Umi Nur H.	BPP Sruweng	Sruweng	
64	Siti Samilah	Kur. Sakti Pura Kendang	Kendang	
65	Sri Puji	Kec. Supri	Supri	
66	Nur Ari K.	Puskas Muli	Muli	
67	Kean N	Distapang	Klaten	
68	HERA	Kendang		

No	NAMA	LEMBAGA/ INSTANSI	ALAMAT DAN NO TELEPON	TANDA TANGAN
69	Junanto Nugraha	BPP Kumsara	Kumsara	
70	Anwar Kholiq	BPP Puring	Puring	
71	Taufiq I	PAS Puring	Puring	
72	Cahesur	BPP Ica	Ica	
73	Imanah Tirta P.	UPB	Kumen	
74	SADAK	Kec. .	Rongklor	
75	Indrayanto	Distapang	Distapang	
76	Wahid B	Distapang	Kbm	
77	Meray Chr.	Kec. Kebumen	Kebumen	
78	Umi Haroliah	cmv	Kebumen	
79	Y. AGUNG P.	DLHR	Kebumen	
80	Kisni Sumapatri	KTNA	Puring	
81	Resti Wulanbari	Distapang	Kebumen	
82	S. Al Karyga	Gepokan	Kawarisan	
83	Uhy Setu	Pertihlani	Kebumen	
84	Pasik	BPP Agung	Strulaw	
85	M. Agus P. F	BPP Kaban	Peburh	
86	Sarah Ami	putr.	Karya	
87	Awal M.	BPP Sedang	Sedang	
88	Promas	Kec. Blup	Blup	
89	Suparno	Poktor		
90	Yoga W.	Distapang	Kebumen	
91	Saukman	Poktor Administrasi	Adi mulyo 087 232 60 232	
92	Maryani	TP. PKK Kab	Kebumen	

No	NAMA	LEMBAGA/ INSTANSI	ALAMAT DAN NO TELEPON	TANDA TANGAN
93	Arif Kurniawan	Distapang	087037674949	
94	Str Sugrainingih	Distapang	081342125438	
95	Kristya R	Distapang	08154854372	
96	Sanhi W	Distapang	081321163686	
97	Intan Wiji E	BPP Ambal	082377862657	
98	Pujianto	Distapang	081327209444	
99	Sumardi	Distapang	081391115699	
100	Agus H	Distapang	085326698332	
101	drh. Dede E.S.	Pusk. Banyan	085740057008	
102	drh. Zaskia P.P	Pusk. Klorong	089636137975	
103	drh. Desy MA	Pusk. Karangra	081278824336	
104	drh. Siningrib	Pusk. Aluan	087808006056	
105	Esty Walyuni	BPP Bulupar	08391573435	
106	Shinta Santi M	BPP Karangsari	081325355363	
107	Adi Siswono	BPP Bayan	085227597446	
108	Agus S	Kec. Aluan	085866170195	
109	Abidin	Kec. Prembun	082323100669	
110	SRI WAHYUNI	DISTAPANG	087837929093	
111	LESTARI	Distapang	087717177469	
112	Hamidatuz Z	Distapang	082138186769	
113	drh. Martilke	Distapang	081327296646	
114	Nani Aina	Distapang	085779963416	
115	Ani Ti Darmas	Distapang		
116	Jumadi UM	Distapang		

No	NAMA	LEMBAGA/ INSTANSI	ALAMAT DAN NO TELEPON	TANDA TANGAN
117	Dwi Yis.	Pendis	Pondok 28773671 6665	
118	AZIZ	KTT.	823.2214.558	
119	R. MUSTOFA	Pendis	Kepulauan 087737 722 500	
120	Elisjokomudata	ker. KRA. ANTAR	085 865 735 17	
121	TPI SULASTRI	Pendis	082133954981	
122	Wahyuni S	Pulama.	0822482336	
123	SAFUL A	PPRP	08128094191	
124	SUBUKRONO	Pendis		
125	Rahayu	Distapang		
126	Heri	Distapang		
127	Dedy	Distapang		
128	Moh Basuki	Distapang		
129	Azzah	Distapang		
130	Asep	Distapang		
131	Wafi NR.	Distapang	085290690729	
132	Nurrahmahdiani.F	Distapang	087837522656	
133	Rijalul Haq	Distapang	082133680928	
134	TRICAMPONO	Distapang	08172821874	
135	Basuki	Distapang		
136	Nai' M A	Distapang	085427363316	
137	Rofiz A.	Distapang	083862361528	
138	Nurul B.A.R	Distapang	088297107111	
139	Ahmad Mustofa	Distapang	082134090255	
140	Siti Rahayu	Distapang	081229399989	

No	NAMA	LEMBAGA/ INSTANSI	ALAMAT DAN NO TELEPON	TANDA TANGAN
141	Elko Andri S.	Distapang	081326655583	
142	Ulf Mungiz	Distapang	081956935381	
143	Wenang Gk	"	085601722464	
144	Ida Mei Uana	Distapang	089654428933	
145	Eka Fitri M.	Distapang	081817427184	
146	Putri Utami	Distapang	081322302421	
147	Nurrahmatani F.	Distapang	081837522656	
148	Wafa Nadia	Distapang	085290690729	
149	Rizka Andri I	Distapang	083148265417	
150	Rinky Pudik	Distapang	085799939809	

Kebumen, 25 Maret 2025
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN


TEGUH YULIONO, S.T., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780731 200501 1 006

**CATATAN HASIL REVIEW
RANCANGAN AKHIR DOKUMEN RENCANA
STRATEGIS PADA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029**



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Arungbinang Nomor 16 Kebumen, Kabupaten Kebumen, Kodepos 54311,
Telepon (0287) 381319 / 381437, Faksimile (0287) 381319,
Laman www.inspektorat.kebumenkab.go.id,
Pos-el inspektoratkabkebumen@gmail.com

CATATAN HASIL REVIU RANCANGAN AKHIR DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN	Disusun oleh	: YESSICA ANINDITA, S.M
	Tanggal	: 18/09/2025
	Paraf	: 
	Direviu oleh	: WAGINAH, S.E
	Tanggal	: 18/09/2025
	Paraf	: 
	Disetujui oleh	: SRI NURNAENI, S.IP
	Tanggal	: 18/09/2025
	Paraf	: 

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Kebumen Nomor 800.1.11.1/1388 tanggal 15 September 2025 untuk melaksanakan reviu Dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, bersama ini kami sampaikan Catatan Hasil Reviu sebagai berikut:

- A. Pengujian Atas Kesesuaian Sistematisa Penyusunan Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

Berdasarkan hasil reviu, diketahui bahwa sistematisa penyajian Rancangan Akhir Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen memiliki kelamahan atau catatan yang perlu dilakukan koreksi dan perbaikan yaitu:

1. BAB I Pendahuluan di sub Latar belakang :

Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Dan Pangan Tahun 2025-2029 telah memberikan gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Dinas Pertanian Dan Pangan Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi dan amanat

Pertanian Dan Pangan Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi dan amanat regulasi namun belum menggambarkan nilai strategis Renstra Dinas Pertanian Dan Pangan.

2. BAB I Pendahuluan di sub Dasar Hukum :
Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Dan Pangan Tahun 2025-2029 telah memberikan Dasar Hukum yang mendasari disusunnya Renstra Dinas Pertanian Dan Pangan Tahun 2025-2029.
3. BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah, Sub Tugas dan Fungsi Struktur Dinas Pertanian Dan Pangan:
Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Dan Pangan Tahun 2025-2029 telah memberikan gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah sub tugas dan fungsi struktur Dinas Pertanian Dan Pangan.
4. BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah, Sub Kinerja pelayanan Dinas Pertanian Dan Pangan (Termasuk Capaian SPM):
Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Dan Pangan Tahun 2025-2029 telah memberikan gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah, sub kinerja pelayanan Dinas Pertanian Dan Pangan serta termasuk capaian SPM.
5. BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah, Sub Isu Strategis:
Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Dan Pangan Tahun 2025-2029 telah memberikan gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah, sub isu strategis. Namun, identifikasi isu strategis belum disesuaikan lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) yang dapat mempengaruhi perangkat daerah baik secara langsung maupun tidak langsung yang mana dapat dirumuskan dari sumber RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh perangkat daerah, yang mana hal ini didasarkan pada Inmendagri No. 2 Tahun 2025 (IV. Tata Cara Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Dan Pangan Tahun 2025-2029).
6. BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan, Sub Arah Kebijakan Dinas Pertanian Dan Pangan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra:

Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Dan Pangan Tahun 2025-2029 telah memberikan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, sub arah kebijakan Dinas Pertanian Dan Pangan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra. Namun, tujuan Renstra Dinas Pertanian Dan Pangan belum ada dasar Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya, Renstra Dinas Pertanian Dan Pangan juga belum ada sasaran yang sesuai dengan dasar Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Dimana kedua hal tersebut mengacu pada Inmendagri No. 2 Tahun 2025 (IV. Tata Cara Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Dan Pangan Tahun 2025-2029).

7. BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan:

Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Dan Pangan Tahun 2025-2029 telah memberikan Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) belum dituangkan dalam Dokumen Renstra, karena Dinas Pertanian dan Pangan tidak mengampu IKK Daerah. Hal ini berdasarkan pada Inmendagri No. 2 Tahun 2025 (IV. Tata Cara Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Dan Pangan Tahun 2025-2029).

B. Pengujian Atas Keterhubungan Dan Kesesuaian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Dengan Tujuan, dan Sasaran Dinas Pertanian Dan Pangan dan/atau Pertumbuhan Kinerja Urusan Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah Bersangkutan Dalam Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan telah selaras dengan tujuan, dan Sasaran Dinas Pertanian Dan Pangan dan/atau Pertumbuhan Kinerja Urusan Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah Bersangkutan Dalam Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

C. Pengujian Atas Keterhubungan Kinerja, Indikator, Dan Target Kinerja Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (IKU)

Telah selarasnya keterhubungan antara Kinerja, Indikator, dan Target Kinerja Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (IKU).

- D. Pengujian Atas Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan Target Kinerja Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (IKK)

Telah selarasnya keterhubungan antara Kinerja, Indikator, Dan Target Kinerja Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (IKK).

- E. Konsistensi Program Prioritas Pada RPJMD Dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

Konsistensi antara Program Prioritas Pada RPJMD Dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 telah selaras.

- F. Konsistensi Dan Keterhubungan Antara Program, Kegiatan, Subkegiatan Pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Dengan Program Perangkat Daerah Pada RPJMD Tahun 2025-2029

Program, Kegiatan, Subkegiatan pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 telah selaras dengan Program Perangkat Daerah Pada RPJMD Tahun 2025-2029.

- G. Pengujian Kesesuaian Antara Target Kinerja Rancangan Akhir Renstra Dinas Pertanian Dan Pangan Tahun 2025-2029 Dengan Pengendalian Dan Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Renstra Dinas Pertanian Dan Pangan Periode Sebelumnya (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Dinas Pertanian Dan Pangan tahun sebelumnya dengan tahun ini berbeda sehingga tidak bisa diuji keselarasannya.

- H. Pengujian Kesesuaian Antara Target Kinerja Rancangan Akhir Renstra Dinas Pertanian Dan Pangan Tahun 2025-2029 Dengan Pengendalian Dan Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Renstra Dinas Pertanian Dan Pangan Periode Sebelumnya (IKK)

Pengujian kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra Dinas Pertanian Dan Pangan Tahun 2025-2029 telah selaras dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Renstra Dinas Pertanian Dan Pangan Periode Sebelumnya (IKK).

- I. Ketaatan Dengan Kaidah-Kaidah Perencanaan Lainnya (Kesesuaian Penetapan Target Subkegiatan Dengan Data Statistik Sektorial Daerah)

Belum ada target program pada tahun 2025 untuk Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025-2029.

J. Rekomendasi

Berdasarkan Catatan Hasil Reviu, disamping terdapat hal-hal yang telah sesuai dengan ketentuan penyusunan Rancangan Akhir Dokumen Renstra Perangkat Daerah, masih terdapat beberapa kekurangan/kekeliruan yang harus diperbaiki. Atas beberapa kelemahan/catatan tersebut direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen agar:

1. Menyusun kembali perumusan latar belakang Renstra Dinas Pertanian Dan Pangan Tahun 2025-2029 yang dilengkapi nilai strategis Renstra Dinas Pertanian dan Pangan yang sesuai dengan Inmendagri No. 2 Tahun 2025.
2. Menyusun kembali isu strategis yang sesuai dengan lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi perangkat daerah baik secara langsung maupun tidak langsung dan menggunakan Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Pertanian Dan Pangan yang mengacu pada Inmendagri No. 2 Tahun 2025.
3. Menambahkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NPSK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk Tujuan Renstra Dinas Pertanian Dan Pangan tahun 2025-2029 sesuai dengan kewenangannya seperti yang tertuang pada Inmendagri No. 2 Tahun 2025.
4. Menambahkan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 pada Renstra Dinas Pertanian Dan Pangan Tahun 2025-2029 seperti yang tertuang pada Inmendagri No. 2 Tahun 2025.
5. Menyusun kembali Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan pada Renstra 2025-2029 agar sesuai dengan Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pertanian Dan Pangan yang tertuang pada Inmendagri No. 2 Tahun 2025, sebagai acuan untuk merumuskan arah kebijakan Renstra Dinas Pertanian Dan Pangan Tahun 2025-2029 pada Arah Kebijakan Dinas Pertanian Dan Pangan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra.
6. Menyusun kembali target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) dengan menambahkan Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci yang sesuai pada Inmendagri No. 2 Tahun 2025.

Kebumen, 18 September 2025

Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan
Kabupaten Kebumen



Teguh Yuliono, S.T., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780731 200501 1006

Inspektur Pembantu Bidang
Pemerintahan Kesejahteraan dan
Desa



Ibnu Sayfudin, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19710604 199803 1 015

**RUMUSAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029**



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Ronggowarsito No. 298 Pejagoan-Kebumen,
Telp/Fax (0287) 382179/382204, e-mail: distapang.kebumen@gmail.com
website: <https://distapang.kebumenkab.go.id/> Kode Pos 54361

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
NOMOR : 700/ 3310 /2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi ukuran kinerja sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan tentang Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi DJawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227)
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 49)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 September 2025

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Kebumen



Teguh Yuliono, S.T., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197807312005011006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 700 / 3310 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS PERTANIAN DAN
PANGAN KABUPATEN KEBUMEN

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEBUMEN

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
1	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat dan Meningkatkan produktivitas sektor pertanian daerah					
1.1		Meningkatkan ketahanan pangan di seluruh daerah		Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Formulasi Pengukuran : 1. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan <i>z-score</i> dan <i>distance to scale</i> (0-100); 2. Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator; 3. Mengelompokan wilayah ke dalam 6 kelompok berdasarkan	Ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah.

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
					cut off point IKP Sumber Data: BAPANAS Penanggungjawab: Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	
1.1.1			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Prevelensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevelence of Undermourishment/PoU</i>)	Formulasi Pengukuran : Membandingkan antara konsumsi kalori per kapita dan MDER. Nilai PoU merupakan proporsi penduduk yang konsumsi kalornya di bawah MDER terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. $PoU = \int_{x < MDER} f(x) dx$ Keterangan: PoU : Proporsi populasi yang mengalami ketidacukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal. MDER: Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kkal (Minimum Dietary Energy Requirement) f(x) : Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu Sumber Data: BAPANAS, BPS	Estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, dimana konsumsi energi biasanya sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat yang dinyatakan dalam bentuk persentase.

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
					Penanggungjawab: Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	
				Nilai Produksi pertanian	Formulasi Pengukuran : Pengukuran didapatkan dari jumlah produksi sektor pertanian di kali harga dalam satuan rupiah Sumber Data: DISTAPANG Penanggungjawab: Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	Nilai produksi pertanian adalah total nilai ekonomi dari semua produk pertanian yang dihasilkan dalam suatu wilayah selama periode waktu tertentu, seperti satu tahun. Ini mencerminkan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian, yang dapat dihitung dengan mengalikan volume produksi dengan harga jualnya.
1.1.1.1			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Formulasi Pengukuran: Diperoleh dari perhitungan 1. Perencanaan Kinerja (30%) 2. Pengukuran Kinerja (30%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Lingkungan	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran dan pelaporan kinerja pada Perangkat Daerah

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
					Pemerintah Kabupaten Kebumen Sumber data ; Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah Penanggung Jawab: DISTAPANG	dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah. Hasil akhir dari evaluasi merupakan penjumlahan komponen-komponen yang memberikan gambaran tingkat akuntabilitas kinerja satuan perangkat daerah, dengan kategori predikat sebagai berikut: NO KATEGORI SKALA CAPAIAN KINERJA KATEGORI 1. AA > 90 - 100 Sangat Memuaskan 2. A > 80 - 90 Memuaskan 3. BB > 70 - 80 Sangat Baik 4. B > 60 - 70 Baik 5. CC > 50 - 60 Cukup (Memadai) 6. C > 30 - 50 Kurang 7. D 0 - 30 Sangat Kurang
				Indeks	Formulasi Pengukuran : Hasil berdasarkan 9 unsur Survei	Indeks Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat IKM

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
				Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Kepuasan Masyarakat yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan Prasarana 9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan. PermenPANRB No.17 Tahun 2017 Sumber Data: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan Penanggungjawab: Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	adalah hasil pengukuran dari kegiatan SKM berupa angka yang ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat)
1.1.1.2			Meningkatnya Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang terkelola dengan baik	Persentase Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang terkelola dengan baik	Formulasi Pengukuran : Persentase Lumbung Pangan yang dikelola dengan baik sampai dengan tahun N dibagi Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat sampai dengan tahun N kali 100%	Fokus pembangunan pada saat ini masih diarahkan pada penanganan masalah kerawanan pangan dan kemiskinan yang berada di pedesaan/perkotaan dengan jalan meningkatkan ketahanan

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
					Sumber Data: DISTAPANG Penanggungjawab: Kepala Bidang Ketahanan Pangan	pangan. Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan keluarga, upaya yang dilakukan antara lain melalui penguatan cadangan pangan masyarakat dalam bentuk kelembagaan lumbung pangan. Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat juga merupakan salah satu indikator ketahanan pangan, sehingga semakin banyak lumbung pangan masyarakat yang terkelola dengan baik, maka ketahanan pangan akan semakin meningkat
1.1.1.3			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	Formulasi Pengukuran : Jumlah Desa yang diintervensi sampai tahun N dibagi jumlah desa rawan pangan tahun 2024 Sumber Data: DISTAPANG Penanggungjawab: Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Kerawanan Pangan adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pangan minimum yang berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor seperti iklim, infrastruktur, kepemilikan lahan, pendapatan, tingkat pendidikan, sosial dan budaya; Diperlukan intervensi oleh Pemerintah agar daerah rawan pangan bisa berkurang

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
1.1.2.			Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	Skor PPH Konsumsi	Formulasi Pengukuran : % Angka Kecukupan Energi (AKE) x bobot masing-masing kelompok pangan Sumber Data: BAPANAS Penanggungjawab: Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	Skor PPH konsumsi adalah Skor Pola Pangan Harapan yang mengukur seberapa baik pola makan masyarakat dalam memenuhi kriteria keberagaman, kecukupan gizi, dan keseimbangan pangan.
1.1.2.1			Meningkatnya Angka Kecukupan Energi	Angka Kecukupan Energi	Formulasi Pengukuran : Angka Kecukupan Energi tahun n Sumber Data: DISTAPANG Penanggungjawab: Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan adalah jumlah energi yang tersedia bagi penduduk suatu wilayah atau negara yang digunakan untuk mengukur kecukupan pasokan pangan dalam suatu populasi.

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
1.1.2.2			Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar	Persentase pangan segar aman	Formulasi Pengukuran : Jumlah pangan aman tahun N dibagi jumlah sampling pangan tahun N kali 100% Sumber Data: DISTAPANG Penanggungjawab: Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT dari cemaran biologis, kimia, dan fisik yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Penjaminan keamanan pangan ini dilakukan melalui pengawasan dan serta pengujian sampel.
2	Meningkatnya produktivitas sektor pertanian daerah					
2.1		Meningkatnya daya saing ekonomi sektor pertanian		Nilai pertanian Produksi	Formulasi Pengukuran : Pengukuran didapatkan dari jumlah produksi sektor pertanian di kali harga dalam satuan rupiah Sumber Data: DISTAPANG Penanggungjawab: Kepala Dinas Pertanian dan	Nilai produksi pertanian adalah total nilai ekonomi dari semua produk pertanian yang dihasilkan dalam suatu wilayah selama periode waktu tertentu, seperti satu tahun. Ini mencerminkan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian, yang dapat dihitung dengan mengalikan volume produksi dengan harga jualnya.

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
					Pangan Kabupaten Kebumen	
2.1.1			Meningkatnya produksi sektor pertanian	Produksi Sektor Pertanian	Formulasi Pengukuran : Jumlah produksi komoditas pertanian (komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) dalam satu ton. Sumber Data: DISTAPANG Penanggungjawab: Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	Produksi Sektor Pertanian adalah jumlah produksi komoditas pertanian per tahun (komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) dalam satuan ton.
2.1.1.1			Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Formulasi Pengukuran : Jumlah kelompok yang diintervensi Tahun N dibagi Jumlah seluruh kelompok x 100%	Jumlah kelompok yang diintervensi dinas Pertanian dan Pangan yang mendapat bantuan ternak dan Bimbingan Teknis, Pembinaan, Alsintan, dan Sarana Produksi pada Sub

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
					Sumber Data: DISTAPANG Penanggungjawab: Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, Kepala Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dan Kelapa Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kegiatan: 1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 2. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 3. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 4. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman 5. Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 6. Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah Kelompok : KWT, Poktan, Gapoktan, KTT, KWTT.
2.1.1.2			Meningkatnya penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase ketersediaan Prasarana Pertanian dalam kondisi baik	Formulasi Pengukuran : Jumlah Volume Prasarana Pertanian kondisi baik sampai dengan tahun N (m3) dibagi Jumlah Volume seluruh Prasarana Pertanian sampai dengan tahun N (m3) x 100%. Prasarana pertanian terdiri dari	Prasarana Pertanian adalah fasilitas fisik beserta layanannya yang diadakan untuk mendukung bekerjanya sistem sosial ekonomi, agar menjadi lebih berfungsi bagi usaha memenuhi kebutuhan dasar dan memecahkan

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
					JITUT, JIDES dan JUT Sumber Data: DISTAPANG Penanggungjawab: Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian	berbagai masalah. Jaringan Irigasi dalam kondisi baik jika: • Luas oncoran Sawah yang terairi lebih dari 50% (lima puluh persen) • Tanggul saluran kokoh • Tanggul saluran tidak terjadi bocoran yang berarti. JUT dalam kondisi baik adalah kondisi jalan pertanian yang berfungsi optimal untuk mendukung mobilitas petani dalam pengangkutan sarana produksi dan distribusi hasil panen
2.1.1.3			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase penyakit hewan yang tertangani	Formulasi Pengukuran : Jumlah penyakit hewan yang tertangani/ Jumlah penyakit hewan yang dilaporkan x 100% Sumber Data: DISTAPANG Penanggungjawab: Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah semua kasus penyakit hewan yang dilaporkan dapat tertangani 100%
2.1.1.4			Meningkatnya	Persentase	Formulasi Pengukuran : Hasil pengendalian tahun N	Hasil pengendalian merupakan Jumlah Luas Serangan

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
			pengendalian dan penanganan bencana pertanian	Peningkatan pengendalian dan penanganan bencana pertanian	dibagi hasil luas lahan sawah tahun 2024 dikali 100% Sumber Data: DISTAPANG Penanggungjawab: Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan. Luas lahan sawah tahun 2024 seluas 40.139,55 Ha
2.1.1.5			Terfasilitasinya Penerbitan Izin Usaha Pertanian dan Peternakan	Persentase izin usaha Pertanian dan Peternakan	Formulasi Pengukuran : Jumlah izin usaha pertanian dan peternakan yang diterbitkan dibagi jumlah pengajuan izin usaha Pertanian dan Peternakan x 100% Sumber Data: DISTAPANG Penanggungjawab: Kepala Bidang Penyuluhan	Izin usaha pertanian dan peternakan diterbitkan oleh Administrasi pelayanan perizinan (OSS atau sistem perizinan daerah). Pengajuan izin usaha pertanian dan peternakan dilakukan oleh pelaku usaha melalui Administrasi pelayanan perizinan (OSS atau sistem perizinan daerah)
2.1.1.6			Meningkatnya Kinerja Penyuluhan Pertanian	Persentase skor Evaluasi Kinerja Penyuluhan Pertanian	Formulasi Pengukuran : (rata-rata skor Evaluasi Kinerja Penyuluhan Pertanian / skor evaluasi tertinggi) x 100% Sumber Data: DISTAPANG	Untuk mengukur kinerja penyuluh pertanian nomor 91 Tahun 2013 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
					Penanggungjawab: Kepala Bidang Penyuluhan	

Kebumen, 15 September 2025
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Kebumen



Teguh Yuliono, S.T., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197807312005011006

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Perangkat Daerah Dinas Pertanian Dan Pangan

2026-03-02

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				25.393.733.015		26.616.746.330		27.680.283.145		29.097.015.374		30.157.683.131		
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				25.393.733.015		26.616.746.330		27.680.283.145		29.097.015.374		30.157.683.131		
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					24.225.233.015		25.108.246.330		26.171.783.145		27.588.515.374		28.649.183.131	
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	77,60	77,61	77,69		77,77		77,85		77,93		78,00		SEKRETARIAT
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Indeks)	89,61	90,45	90,50		90,55		90,60		90,65		90,70		SEKRETARIAT
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					107.943.000		107.943.000		107.943.000		107.943.000		107.943.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	34	40	40		40		40		40		40		Perencanaan
2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					53.764.000		53.764.000		53.764.000		53.764.000		53.764.000	Perencanaan
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	9	22	22		22		22		22		22		Perencanaan
2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					54.179.000		54.179.000		54.179.000		54.179.000		54.179.000	Perencanaan
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	25	18	18		18		18		18		18		Perencanaan
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					20.434.785.015		21.117.796.866		22.381.335.145		23.798.067.374		24.858.735.131	
	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Keuangan
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					20.393.997.015		21.077.008.866		22.340.547.145		23.757.279.374		24.817.947.131	Keuangan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	178	211	211		211		211		211		211		Keuangan
2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					40.788.000		40.788.000		40.788.000		40.788.000		40.788.000	Keuangan
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	38	22	14		14		14		14		14		Keuangan
2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					4.438.000		4.438.000		4.438.000		4.438.000		4.438.000	
	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	3	4	4		4		4		4		4		Umum dan Kepegawaian
2.09.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					4.438.000		4.438.000		4.438.000		4.438.000		4.438.000	Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	3	4	4		4		4		4		4		Umum dan Kepegawaian
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	0	0	12		12		12		12		12		Umum dan Kepegawaian
2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	0	0	290		290		290		290		290		Umum dan Kepegawaian
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					208.092.000		208.092.000		208.092.000		208.092.000		208.092.000	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Umum dan Kepegawaian
2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					4.473.000		4.473.000		4.473.000		4.473.000		4.473.000	Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	4		4		4		4		4		Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	2	2		2		2		2		2		Umum dan Kepegawaian
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					74.894.000		74.894.000		74.894.000		74.894.000		74.894.000	Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	12		12		12		12		12		Umum dan Kepegawaian
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					6.682.000		6.682.000		6.682.000		6.682.000		6.682.000	Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	4	4		4		4		4		4		Umum dan Kepegawaian
2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					4.290.000		4.290.000		4.290.000		4.290.000		4.290.000	Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		Umum dan Kepegawaian
2.09.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material					47.148.000		47.148.000		47.148.000		47.148.000		47.148.000	Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	4	4		4		4		4		4		Umum dan Kepegawaian
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Umum dan Kepegawaian
2.09.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					5.605.000		5.605.000		5.605.000		5.605.000		5.605.000	Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4		Umum dan Kepegawaian
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					212.210.000		412.211.464		212.210.000		212.210.000		212.210.000	
	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Unit)	64	57	59		59		59		59		59		Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					27.650.000		27.650.000		27.650.000		27.650.000		27.650.000	Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	42	31	22		22		22		22		22		Umum dan Kepegawaian
2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					84.560.000		84.560.000		84.560.000		84.560.000		84.560.000	Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	10	11	17		17		17		17		17		Umum dan Kepegawaian
2.09.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					100.000.000		300.001.464		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	12	15	20		20		20		20		20		Umum dan Kepegawaian
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.912.971.000		2.912.971.000		2.912.971.000		2.912.971.000		2.912.971.000	
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Umum dan Kepegawaian
2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2.496.000		2.496.000		2.496.000		2.496.000		2.496.000	Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	4		4		4		4		4		Umum dan Kepegawaian
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					336.262.000		336.262.000		336.262.000		336.262.000		336.262.000	Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Umum dan Kepegawaian
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					2.574.213.000		2.574.213.000		2.574.213.000		2.574.213.000		2.574.213.000	Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Umum dan Kepegawaian
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					294.794.000		294.794.000		294.794.000		294.794.000		294.794.000	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Unit)	34	37	20		20		20		20		20		Umum dan Kepegawaian
2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					67.244.000		67.244.000		67.244.000		67.244.000		67.244.000	Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	9	14	9		9		9		9		9		Umum dan Kepegawaian
2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					11.550.000		11.550.000		11.550.000		11.550.000		11.550.000	Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	16	16	4		4		4		4		4		Umum dan Kepegawaian
2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					216.000.000		216.000.000		216.000.000		216.000.000		216.000.000	Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	9	7	7		7		7		7		7		Umum dan Kepegawaian
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					440.000.000		840.000.000		840.000.000		840.000.000		840.000.000	
	Meningkatnya Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang dikelola dengan baik	Persentase Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang dikelola dengan baik (Dengan Satuan:%)	89,50	89,50	89,76		90,29		90,81		91,34		91,86		KETAHANAN PANGAN
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					440.000.000		840.000.000		840.000.000		840.000.000		840.000.000	
	Tersedianya Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang dikelola dengan baik	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang dikelola dengan baik (Dengan Satuan:Unit)	341	341	342		344		346		348		350		Infrastruktur Kemandirian pangan dan Kerawanan Pangan
2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya					440.000.000		840.000.000		840.000.000		840.000.000		840.000.000	Infrastruktur Kemandirian pangan dan Kerawanan Pangan
	Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Dengan Satuan:Unit)	0	0	2		4		4		4		4		Infrastruktur Kemandirian pangan dan Kerawanan Pangan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					472.000.000		472.000.000		472.000.000		472.000.000		472.000.000	
	Meningkatnya Angka Kecukupan Energi	Angka Kecukupan Energi (Dengan Satuan:Kkal/Kapita/Hari)	3645,56	3650,56	3655,56		3660,56		3665,56		3670,56		3675,56		KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					71.000.000		71.000.000		71.000.000		71.000.000		71.000.000	
	Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (Dengan Satuan:Kali)	27	27	27		27		27		27		27		Distribusi dan Cadangan Pangan
2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota					46.000.000		46.000.000		46.000.000		46.000.000		46.000.000	Distribusi dan Cadangan Pangan
	Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:laporan)	27	27	27		27		27		27		27		Distribusi dan Cadangan Pangan
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)					25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Distribusi dan Cadangan Pangan
	Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4		Distribusi dan Cadangan Pangan
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota					325.000.000		325.000.000		325.000.000		325.000.000		325.000.000	
	Terlaksananya pengelolaan cadangan pangan pemerintah	Persentase Pengelolaan Cadangan Pangan (Dengan Satuan:Persen)	40,05	11,63	17,89		17,89		17,89		17,89		17,89		Distribusi dan Cadangan Pangan
2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota					325.000.000		325.000.000		325.000.000		325.000.000		325.000.000	Distribusi dan Cadangan Pangan
	Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara (Dengan Satuan:Ton)	44,76	13	20		20		20		20		20		Distribusi dan Cadangan Pangan
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi					76.000.000		76.000.000		76.000.000		76.000.000		76.000.000	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah laporan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		Diversifikasi dan Keamanan Pangan
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					76.000.000		76.000.000		76.000.000		76.000.000		76.000.000	Diversifikasi dan Keamanan Pangan
	Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dengan Satuan:Laporan)	1	4	4		4		4		4		4		Diversifikasi dan Keamanan Pangan
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					216.500.000		96.500.000		96.500.000		96.500.000		96.500.000	
	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan (Dengan Satuan:%)	30,43	45,65	54,35		63,04		71,74		80,43		89,13		KETAHANAN PANGAN
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan					12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000	
	Tersusunnya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kecamatan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	4	4		4		4		4		4		Infrastruktur Kemandirian pangan dan Kerawanan Pangan
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan					12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000	Infrastruktur Kemandirian pangan dan Kerawanan Pangan
	Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	4	4		4		4		4		4		Infrastruktur Kemandirian pangan dan Kerawanan Pangan
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota					204.000.000		84.000.000		84.000.000		84.000.000		84.000.000	
	Tertanganinya Desa Rawan Pangan	Jumlah desa rawan pangan yang ditangani (Dengan Satuan:Desa)	14	21	25		29		33		37		41		Infrastruktur Kemandirian pangan dan Kerawanan Pangan
2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					204.000.000		84.000.000		84.000.000		84.000.000		84.000.000	Infrastruktur Kemandirian pangan dan Kerawanan Pangan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	3	4	4		4		4		4		4		Infrastruktur Kemandirian pangan dan Kerawanan Pangan
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					40.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
	Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar	Persentase pangan segar aman (Dengan Satuan:%)	92,75	92,94	93,53		94,12		94,71		95,29		95,88		KETAHANAN PANGAN
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota					40.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
	Terlaksananya pengawasan keamanan dan mutu pangan segar	Jumlah pangan aman (Dengan Satuan:Sampel)	307	158	159		160		161		162		163		Diversifikasi dan Keamanan Pangan
2.09.05.2.01.0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan					40.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Diversifikasi dan Keamanan Pangan
	Terlaksananya koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dengan Satuan:Laporan)	1	4	4		4		4		4		4		Diversifikasi dan Keamanan Pangan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				26.033.596.868		24.129.285.855		34.832.397.468		35.165.208.074		26.493.767.037		
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				26.033.596.868		24.129.285.855		34.832.397.468		35.165.208.074		26.493.767.037		
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					5.457.436.207		3.012.852.000		7.114.052.326		7.446.862.933		3.988.921.256	
	Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Dengan Satuan:Persen)	9,58	9,25	9,31		9,37		9,52		9,55		9,61		SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian					801.787.207		407.203.000		1.767.203.000		1.767.203.000		407.203.000	
	Meningkatnya Penyediaan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan Sarana Pertanian (Dengan Satuan:Persen)	67,27	69,25	70		71		72		73		74		Sarana Pertanian
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi					759.656.207		331.623.000		1.691.623.000		1.691.623.000		331.623.000	Sarana Pertanian
	Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		Sarana Pertanian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian					42.131.000		75.580.000		75.580.000		75.580.000		75.580.000	Sarana Pertanian
	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	2		2		2		2		2		Sarana Pertanian
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota					396.696.000		486.696.000		1.986.696.000		2.086.696.000		608.754.323	
	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDG yang ditingkatkan, yang dimanfaatkan dan yang dijamin kemurniannya (Dengan Satuan:Komoditas)	10	10	11		13		15		17		19		Produksi
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman					260.809.000		250.809.000		1.250.809.000		1.250.809.000		272.867.323	Produksi
	Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dengan Satuan:Dokumen)	3	3	3		3		3		3		3		Produksi
3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman					100.859.000		100.859.000		100.859.000		100.859.000		100.859.000	Penanganan Pasca Panen
	Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	3		3		3		3		3		Penanganan Pasca Panen
3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman					35.028.000		135.028.000		635.028.000		735.028.000		235.028.000	Penanganan Pasca Panen
	Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Dengan Satuan:Varietas Unggul Baru (VUB))	1	1	1		1		1		1		1		Penanganan Pasca Panen
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota					19.000.000		39.000.000		39.000.000		39.000.000		39.000.000	
	Terfasilitasinya KTT yang menerapkan pemberian pakan/HPT unggul	Jumlah KTT yang terfasilitasi untuk menerapkan pemberian pakan/HPT unggul (Dengan Satuan:Kelompok)	10	10	10		10		10		10		10		Kesehatan Masyarakat Veteriner
3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil					19.000.000		39.000.000		39.000.000		39.000.000		39.000.000	Kesehatan Masyarakat Veteriner
	Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		Kesehatan Masyarakat Veteriner

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer					10.953.000		10.953.000		10.953.000		10.953.000		10.953.000	
	Terawasinya pengecer obat hewan	Jumlah pengecer obat hewan yang diawasi (Dengan Satuan:unit usaha)	8	8	8		8		8		8		8		Kesehatan Hewan
3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan					10.953.000		10.953.000		10.953.000		10.953.000		10.953.000	Kesehatan Hewan
	Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		Kesehatan Hewan
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota					950.000.000		1.190.000.000		1.190.000.000		1.190.000.000		1.190.000.000	
	Terlaksananya peredaran benih/bibit ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar melalui kegiatan inseminasi buatan (Dengan Satuan:Dosis)	11000	11000	11000		11000		11000		11000		11000		Perbibitan dan Produksi Peternakan
3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak					950.000.000		1.190.000.000		1.190.000.000		1.190.000.000		1.190.000.000	Perbibitan dan Produksi Peternakan
	Terjaminnya peredaran benih/bibit ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		Perbibitan dan Produksi Peternakan
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain					3.279.000.000		879.000.000		2.120.200.326		2.353.010.933		1.733.010.933	
	Terfasilitasinya Kelompok Tani ternak yang mendapatkan Bantuan Bibit ternak	Jumlah Kelompok Tani ternak yang mendapatkan Bantuan Bibit ternak (Dengan Satuan:Kelompok)	30	0	48		8		8		8		8		Perbibitan dan Produksi Peternakan
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain					3.279.000.000		879.000.000		2.120.200.326		2.353.010.933		1.733.010.933	Perbibitan dan Produksi Peternakan
	Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Dengan Satuan:Ekor)	585	0	596		108		113		124		124		Perbibitan dan Produksi Peternakan
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					18.533.585.400		18.816.689.855		25.317.351.142		25.317.351.141		20.003.851.781	
	Meningkatnya Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase ketersediaan Prasarana Pertanian dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	28,94	29,14	29,16		29,21		29,27		29,33		29,39		SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian					2.959.932.600		3.059.932.600		3.108.796.600		3.108.796.600		3.108.796.600	
	Meningkatnya Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah kelompok tani yang difasilitasi prasarana pertanian (Dengan Satuan:Kelompok)	10	10	11		11		11		11		11		Pengelolaan lahan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya					2.943.267.600		2.943.267.600		2.943.267.600		2.943.267.600		2.943.267.600	Pengelolaan lahan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Dengan Satuan:Laporan)	2	1	1		1		1		1		1		Pengelolaan lahan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota					16.665.000		66.665.000		115.529.000		115.529.000		115.529.000	Pengelolaan lahan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Pengelolaan lahan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian					0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Pengelolaan lahan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0		1		1		1		1		Pengelolaan lahan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian					15.523.652.800		15.606.757.255		21.808.554.542		21.808.554.541		16.495.055.181	
	Tersedianya Prasarana Pertanian	Penyediaan Prasarana Pertanian (Dengan Satuan:Unit)	62	18	17		18		18		18		18		Penyediaan Prasarana Pertanian
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani					1.200.000.000		1.200.000.000		3.200.000.000		3.200.000.000		1.200.000.000	Penyediaan Prasarana Pertanian
	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	25	5	5		6		6		6		6		Penyediaan Prasarana Pertanian
3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya					672.597.000		922.597.000		797.597.000		797.597.000		1.484.097.639	Penyediaan Prasarana Pertanian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	1	2	2		3		3		3		3		Penyediaan Prasarana Pertanian
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya					11.050.000.000		11.350.000.000		13.676.797.287		13.676.797.286		11.676.797.287	Penyediaan Prasarana Pertanian
	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	22	4	2		2		2		2		2		Penyediaan Prasarana Pertanian
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani					1.270.000.000		803.104.455		2.803.104.455		2.803.104.455		803.104.455	Penyediaan Prasarana Pertanian
	terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	12	5	5		4		4		4		4		Penyediaan Prasarana Pertanian
3.27.03.2.02.0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas					200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Penyediaan Prasarana Pertanian
	Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Dengan Satuan:Unit)	0	0	1		1		1		1		1		Penyediaan Prasarana Pertanian
3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan					1.131.055.800		1.131.055.800		1.131.055.800		1.131.055.800		1.131.055.800	Penyediaan Prasarana Pertanian
	Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Dengan Satuan:Unit)	2	2	2		2		2		2		2		Penyediaan Prasarana Pertanian
3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota					50.000.000		150.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	
	Terfasilitasinya Wilayah Sumber Bibit dalam rangka pelestarian	Jumlah wilayah sumber bibit sapi PO yang difasilitasi (Dengan Satuan:Kecamatan)	6	6	6		6		6		6		6		Perbibitan dan Produksi Peternakan
3.27.03.2.03.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak					50.000.000		150.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	Perbibitan dan Produksi Peternakan
	Terlaksananya Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		Perbibitan dan Produksi Peternakan
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					515.937.000		714.801.000		714.801.000		714.801.000		714.801.000	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase penyakit hewan yang tertangani (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
	Terjaminnya Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan pencegahan penyakit hewan yang ditangani (Dengan Satuan:Ekor)	13907	10000	10000		10000		10000		10000		10000		Kesehatan Hewan
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Kesehatan Hewan
	Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		Kesehatan Hewan
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota					129.000.000		229.000.000		229.000.000		229.000.000		229.000.000	
	Terawasinya Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan/pemeriksaan pemasukan dan pengeluaran hewan (Dengan Satuan:Ekor)	986	1000	650		1000		1000		1000		1000		Kesehatan Hewan
3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)					65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000	Kesehatan Hewan
	Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (Dengan Satuan:laporan)	1	1	1		1		1		1		1		Kesehatan Hewan
3.27.04.2.02.0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya					64.000.000		164.000.000		164.000.000		164.000.000		164.000.000	Kesehatan Hewan
	Terkendalinya Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		Kesehatan Hewan
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota					270.000.000		270.000.000		270.000.000		270.000.000		270.000.000	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terkelolanya Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan pengobatan penyakit hewan (Dengan Satuan:Ekor)	68493	10000	10000		10000		10000		10000		10000		Kesehatan Hewan
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner					270.000.000		270.000.000		270.000.000		270.000.000		270.000.000	Kesehatan Hewan
	Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		Kesehatan Hewan
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner					16.937.000		115.801.000		115.801.000		115.801.000		115.801.000	
	Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha produk hewan yang dibina (Dengan Satuan:Unit usaha)	12	25	30		30		30		30		30		Kesehatan Masyarakat Veteriner
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan					16.937.000		115.801.000		115.801.000		115.801.000		115.801.000	Kesehatan Masyarakat Veteriner
	Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		Kesehatan Masyarakat Veteriner
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					345.406.519		371.406.000		472.656.000		472.656.000		572.656.000	
	Meningkatnya pengendalian dan penanganan bencana pertanian	Persentase Peningkatan pengendalian dan penanganan bencana pertanian (Dengan Satuan:%)	1,38	1,38	1,51		1,53		1,68		1,71		1,73		TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota					345.406.519		371.406.000		472.656.000		472.656.000		572.656.000	
	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas area pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Ha)	555	555	605		615		675		685		695		Perbenihan dan Perlindungan Tanaman
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan					263.087.519		289.087.000		339.087.000		339.087.000		439.087.000	Perbenihan dan Perlindungan Tanaman
	Terkendalnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Dengan Satuan:Ha)	555	555	555		565		575		585		595		Perbenihan dan Perlindungan Tanaman

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan					48.750.000		48.750.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Perbenihan dan Perlindungan Tanaman
	Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Dengan Satuan:Ha)	0	0	50		50		100		100		100		Perbenihan dan Perlindungan Tanaman
3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan					33.569.000		33.569.000		33.569.000		33.569.000		33.569.000	Perbenihan dan Perlindungan Tanaman
	Tertanggulangnya pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	2		2		2		2		2		Perbenihan dan Perlindungan Tanaman
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					29.180.000		29.180.000		29.180.000		29.180.000		29.180.000	
	Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Pertanian dan Peternakan	Persentase izin usaha Pertanian dan Peternakan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		PENYULUHAN
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					14.599.000		14.599.000		14.599.000		14.599.000		14.599.000	
	Terfasilitasinya izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang difasilitasi (Dengan Satuan:unit usaha)	92	48	48		48		48		48		48		Perizinan Pertanian dan Peternakan
3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian					14.599.000		14.599.000		14.599.000		14.599.000		14.599.000	Perizinan Pertanian dan Peternakan
	Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	4		4		4		4		4		Perizinan Pertanian dan Peternakan
3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan					14.581.000		14.581.000		14.581.000		14.581.000		14.581.000	
	Terfasilitasinya izin usaha peternakan	Jumlah izin usaha peternakan yang difasilitasi (Dengan Satuan:unit usaha)	124	60	60		60		60		60		60		Perizinan Pertanian dan Peternakan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.27.06.2.02.0001	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan					14.581.000		14.581.000		14.581.000		14.581.000		14.581.000	Perizinan Pertanian dan Peternakan
	Terlaksananya Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	4		4		4		4		4		Perizinan Pertanian dan Peternakan
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					1.152.051.742		1.184.357.000		1.184.357.000		1.184.357.000		1.184.357.000	
	Meningkatnya Kinerja Penyuluhan Pertanian	Persentase skor Evaluasi Kinerja Penyuluhan Pertanian (Dengan Satuan:Persen)	72,50	73,75	75,00		77,50		80,00		82,50		85,00		PENYULUHAN
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian					1.152.051.742		1.184.357.000		1.184.357.000		1.184.357.000		1.184.357.000	
	Meningkatnya Kinerja Penyuluhan Pertanian	Rata-rata skor Evaluasi Kinerja Penyuluhan Pertanian (Dengan Satuan:Skor)	58	59	60		62		64		66		68		Sarana Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa					327.694.000		360.000.000		360.000.000		360.000.000		360.000.000	Sarana Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Unit)	34	34	34		35		36		37		38		Sarana Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa					127.453.742		127.453.000		127.453.000		127.453.000		127.453.000	Kelembagaan dan Pembiayaan Pertanian
	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Unit)	50	50	30		30		30		30		30		Kelembagaan dan Pembiayaan Pertanian
3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota					65.941.000		65.941.000		65.941.000		65.941.000		65.941.000	Sarana Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Dengan Satuan:Unit)	2	4	2		2		2		2		2		Sarana Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian					603.680.000		603.680.000		603.680.000		603.680.000		603.680.000	Sarana Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Dengan Satuan:Orang)	0	128	128		128		128		128		128		Sarana Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani					27.283.000		27.283.000		27.283.000		27.283.000		27.283.000	Kelembagaan dan Pembiayaan Pertanian
	Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Dengan Satuan:Unit)	1	1	1		1		1		1		1		Kelembagaan dan Pembiayaan Pertanian
			TOTAL:		51.427.329.883		50.746.032.185		62.512.680.613		64.262.223.448		56.651.450.168		